



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

# KONSTRUKSI HUKUM ISLAM DI INDONESIA STUDI TERHADAP FATWA-FATWA MAJELIS TARJIH DAN TAJDID MUHAMMADIYAH TENTANG HUKUM KELUARGA (1980 – 2017)

## DISERTASI

Diajukan Guna Melengkapi Salah Satu Persyaratan  
Memperoleh Gelar Doktor (Dr.) Program Studi  
Hukum Keluarga (Ahwal al-Syakhshiyah)



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

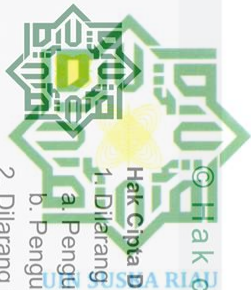
UIN SUSKA RIAU

**SUYONO**

NIM. 31695104777

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
1442/2021



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIYERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
**PASCASARJANA**  
**كلية الدراسات العليا**  
**THE GRADUATE PROGRAMME**

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004  
Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

**Lembaran Pengesahan**

Nama : Suyono  
Nomor Induk Mahasiswa : 31695104777  
Jelar Akademik : Dr. (Doktor)  
Judul : Konstruksi Hukum Islam di Indonesia Studi terhadap Fatwa-Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah tetang Hukum Keluarga (1980-2017)

Tim Penguji

**Prof. Dr. Afrizal M, MA**  
Penguji I/Ketua

**Drs. H. Iskandar Arnel, MA., Ph.D**  
Penguji II/Sekretaris

**Dr. Jumni Nelli, M.Ag**  
Penguji III

**Prof. Dr. A. Husein Ritonga, MA**  
Penguji IV

**Dr. Khairunnas Jamal, M.Ag**  
Penguji V

**Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA**  
Penguji VI/Promotor

**Dr. H. Helmi Basri, Lc., MA**  
Penguji VII/Co- Promotor

Tanggal Ujian/Pengesahan : 9 Februari 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



## PERSETUJUAN UJIAN TERBUKA

Kami yang bertandatangan di bawah ini selaku pembimbing Disertasi, dengan ini menyetujui bahwa disertasi yang berjudul **“Konstruksi Hukum Islam Di Indonesia Studi Terhadap Fatwa-Fatwa Majelis Tarjih Dan Tajdid Muhammadiyah Tentang Hukum Keluarga (1980-1917 “** yang ditulis oleh:

Nama : **Suyono**  
NIM : **31695104777**  
Program Studi : **Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah)**

Untuk diajukan dalam Sidang ujian Terbuka ( Ujian Promosi Doktor) Pada Pasca Sarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Tanggal, Januari 2021  
Promotor,

Tanggal, Januari 2021  
Co. Promotor,

**Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA**  
NIP. 196112301989031002

**Dr. H. Helmi Basri, Lc., MA**  
NIP. 197407042006041003

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah)

**Dr. Jumni Nelli, M.Ag**  
NIP. 172062822005012004

© Hak Cipta dimiliki UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PERSETUJUAN TIM PENGUJI SIDANG UJIAN TERTUTUP

Disertasi yang berjudul “KONSTRUKSI HUKUM ISLAM DI INDONESIA STUDITERHADAP FATWA-FATWA MAJELIS TARJIH DAN TAJDID MUHAMMADIYAH TENTANG HUKUM KELUARGA (1980-1917)” yang ditulis oleh Sdr. Suyono NIM 31695104777, Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsyiyah) telah diuji dan diperbaiki sesuai dengan masukan dari Tim Penguji Disertasi Ujian Tertutup pada tanggal 29 Desember 2020 dan dapat disetujui untuk diajukan dalam Sidang Ujian Terbuka (Ujian Promosi Doktor) pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

### TIM PENGUJI

Ketua

Drs. H. Iskandar Arnel, M.A., Ph.D

Penguji I

Tanggal:

Sekretaris

Dr. Rusdi, M.A

Penguji II

Tanggal:

Penguji III

Dr. Jumni Nelli, M.Ag

Tanggal:

Penguji IV

Prof. Dr. A. Husein Ritonga, M.A

Tanggal:

Penguji V (Promotor)

Prof. Dr. H. Ilyas Husti

Tanggal:

Penguji VI (Co-Promotor)

Dr. H. Helmi Basri, Lc., MA

Tanggal:



**Prof. Dr. H. ILYAS HUSTI, MA**  
**DOSEN PROGRAM PASCA SARJANA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**NOTA DINAS**

Perihal : Disertasi Saudara  
**SUYONO**

Jepang Yth :

**Direktur Program Pascasarjana**

**UIN SUSKA RIAU**

Pekanbaru

*Assalamu 'Alaikum Wr. Wb*

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan-perbaikan terhadap isi Disertasi saudara :

Nama	: <b>SUYONO</b>
NIM	: <b>31695104777</b>
Program Studi	: <b>Hukum Keluarga</b>
Konsentrasi	: <b>Hukum Keluarga</b>
Judul	: <b>KONSTRUKSI HUKUM ISLAM DI INDONESIA STUDITERHADAP FATWA-FATWA MAJELIS TARJIH DAN TAJDID MUHAMMADIYAH TENTANG HUKUM KELUARGA (1980-1917)</b>

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam Sidang Ujian Terbuka (Ujian Promosi Doktor) Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Pekanbaru, Januari 2021  
 Promotor,

**Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA**  
 NIP : 196112301989031002

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Dr. H. HELMI BASRI, Lc., MA**  
DOSEN PROGRAM PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

NOTA DINAS

Perihal : Disertasi Saudara  
SUYONO

Kepada Yth :  
**Direktor Program Pascasarjana**  
UIN SUSKA RIAU

di-  
Pekanbaru

*Assalamu 'Alaikum Wr. Wb*

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan-perbaikan terhadap isi Disertasi saudara :

Nama	: <b>SUYONO</b>
NIM	: 31695104777
Program Studi	: Hukum Keluarga
Konsentrasi	: Hukum Keluarga
Judul	: <b>KONSTRUKSI HUKUM ISLAM DI INDONESIA STUDITERHADAP FATWA-FATWA MAJELIS TARJIH DAN TAJDID MUHAMMADIYAH TENTANG HUKUM KELUARGA (1980-1917)</b>

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam Sidang Ujian Terbuka (Ujian Promosi Doktor) Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pekanbaru, Januari 2021  
Co-Promotor

**Dr. H. Helmi Basri, Lc., MA**  
NIP. 197407042006041003

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## SURAT PERNYATAAN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SUYONO**  
 NIM : **31695104777**  
 Tempat/Tgl lahir : **Klaten, 11 Desember 1976**  
 Program Studi : **Hukum Keluarga**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Disertasi yang saya tulis dengan judul “Konstruksi Hukum Islam di Indonesia: Studi Terhadap Fatwa-Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Tentang Hukum Keluarga (1980-2017)”, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor pada Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau, merupakan hasil karya saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu yang terdapat di Disertasi ini, yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan seluruh atau sebahagian disertasi ini bukan hasil karya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan Gelar Akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pekanbaru, Januari 2021



Suyono

NIM: 31695104777



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu`alaikum Wr Wb

Puji dan syukur penulis persembahkan kepada Allah swt yang telah mencurahkan rahmat dan hidayah serta inayah kepada penulis, sehingga mampu menyelesaikan penulisan disertasi ini. shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW, sebagai figur teladan dalam kehidupan yang penulis amalkan seraya mengharapkan kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Penulis mengungkapkan rasa terima kasih yang tulus kepada berbagai pihak baik secara individu maupun kelompok, lembaga atau instansi yang telah memberikan bantuan baik moril kepada penulis dari awal perkuliahan pada program Doktor (S3) di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau sampai penulisan dan penyelesaian disertasi. Secara khusus rasa terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Ayahanda (Hadi Suwarno) dan ibunda `Atmi (alm) tercinta yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan kasih sayang, dan atas doa beliau sehingga penulis dapat memperoleh prestasi akademik tertinggi dan mampu menyelesaikan disertasi ini.
2. Istri tercinta Indah Yulaika, S.Pd.I, dan anak tersayang Luluk Indah Elyana dan Muthi`ah Muthmainnah yang telah memberikan dukungan penuh kepada penulis sehingga proses penulisan ini berjalan lancar sesuai yang diharapkan.
3. Bapak Prof. Dr. Suyitno, M.Ag, Plt. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk meraih derajat akademik Program Doktor di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, sebuah Universitas yang patut dibanggakan karena prestasi dan kredibilitasnya dalam mendidik bangsa.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4. Prof. Dr. Afrizal, M. MA, Direktur, Drs. Iskandar Arnel, MA., Ph.D, selaku Wakil Direktur dan Dr. Jumni Nelli, M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah banyak memberikan inspirasi berharga baik selama studi maupun dalam penulisan disertasi ini.
5. Bapak Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA dan Dr. H. Helmi Basri, Lc, MA, Promotor dan Co Promotor yang penuh kearifan dan kesabaran, yang tidak saja mencerahkan namun juga telah memberi tambahan ilmu yang sangat berharga, terutama dalam penyelesaian dan mempertanggungjawabkan karya ilmiah ini.
6. Segenap Guru Besar dan Dosen Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan, informasi, pemikiran dan wawasan selama mengikuti perkuliahan dan dalam penulisan disertasi ini.
7. Pihak pelaksana administrasi dan akademik program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang dengan dedikasi tinggi telah bekerja sama secara baik dalam melayani keperluan penyelesaian disertasi ini.

Akhirnya kendati tidak disebutkan satu persatu, penulis senantiasa memanjatkan doa semoga senantiasa segala perhatian dan jasa baik yang telah diberikan mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah swt.

Wassalamu`alaikum Wr. Wb

Pekanbaru, Februari 2021

**SUYONO**  
NIM: 31695104777

## DAFTAR ISI

	Hal
Halaman Judul .....	i
Persetujuan Tim Penguji.....	ii
Nota Dinas Promotor .....	iii
Nota Dinas Co-Promotor .....	iv
Persetujuan Promotor dan Co- Promotor .....	v
Surat Pernyataan .....	vi
Kata Pengantar .....	vii
Daftar Isi .....	x
Pedoman Transliterasi.....	xiv
Abstrak .....	xxi
<b>Bab I Pendahuluan .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pembatasan dan Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan dan Signifikansi.....	12
1. Tujuan Penelitian .....	12
a. Tujuan Akademis .....	12
b. Tujuan Terapan .....	12
2. Signifikansi .....	12
a. Signifikansi Akademis .....	12
b. Signifikansi Terapan .....	13
<b>Bab II Landasan Teoritis Dan Tinjauan Kepustakaan.....</b>	<b>14</b>
A. Landasan Teoritis.....	14
1. Teori Konstruksi Sosial .....	14
2. Istilah-Istilah Yang Berkaitan Dengan Penelitian .....	15
3. Metode Pembaruan Hukum Keluarga .....	19
a. Metode Konvensional .....	19
b. Metode Pembaruan Hukum Keluarga Kontemporer .....	36
c. Metode <i>istishlāhî</i> .....	43

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Masalah Lima ( <i>al-masā'il al-khams</i> ) .....	44
5. Kerangka dasar pemikiran Muhammadiyah tentang keluarga sakinah. ....	46
6. Manhaj Tarjih Muhammadiyah. ....	49
7. Pendekatan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dalam ijtihad Hukum Islam ( <i>bayānî, burhānî, `irfānî</i> ) .....	54
B. Tinjauan Kepustakaan.....	60
<b>Bab III Metode Penelitian.....</b>	<b>65</b>
A. Teknik Pengumpulan Data .....	66
B. Analisis Data .....	67
C. Sistematika Penulisan .....	67
<b>Bab IV Sejarah Majelis Tarjih dan Analisis Fatwa-Fatwa Tentang Hukum Keluarga (1980-2017).....</b>	<b>75</b>
A. Sejarah Majelis Tarjih dan Tajdid .....	76
1. KH. Mas Manshur (1927-1936) .....	81
2. Ki Bagus Hadi Kusumo (1936-1942) .....	89
3. KH. Ahmad Badawi (1942-1950).....	93
4. K.R.H Hadjid (1950-1959) .....	96
5. K.R.T Wardan Diponingrat (1959-1985) .....	97
6. KH. Azhar Basyir, MA (1985-1990).....	99
7. Prof. Drs. H. Asymuni Abdurrahman (1990-1995) .....	100
8. Prof. H. Amin Abdullah, MA (1995-2000). ....	101
9. Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA (2000-sekarang) .....	102
B. Analisis Fatwa-fatwa Tentang Hukum Keluarga (1980-2017)..	116
1. Fatwa tentang pra nikah .....	116
a. Periksa Kesehatan sebelum Pernikahan. ....	116
b. Maskawin .....	121
c. Meminang dan Walimahan .....	126
d. Tukar Cincin.....	131





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

**© Hak cipta milik UIN Suska Riau**

**State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Fatwa tentang pernikahan .....	135
a. Nikah Wanita dalam Keadaan Hamil.....	135
b. Memperbarui Perkawinan setelah Masuk Islam .....	141
c. Bunyi Akad Nikah. ....	145
d. Haram karena Sesusuan. ....	148
e. Menikahi Janda Paman. ....	153
f. Kawin sesudah Berzina.....	155
g. Wali Anak Zina.....	160
h. Nikah di Catatan Sipil menurut Agama .....	164
i. Kawin Lari .....	171
j. Perkawinan Saudara Kembar .....	174
k. Poligami .....	176
l. Nikah Mut`ah atau Kawin Kontrak.....	180
m. Bolehkah Anak Angkat Menjadi Ahli Waris atau dikawini? .....	186
n. Pengantin Laki-laki Mewakikan Saat Nikah .....	189
o. Pengantin Nikah Saat Haid .....	193
p. Nikah tanpa Wali.....	194
q. Ayat-ayat Pernikahan (QS. Al-Ahzab : 50) .....	201
r. Hukum Perkawinan antara Saudara Sepupu. ....	203
s. Hukum Nikah Sirri.....	208
3. Fatwa tentang talak, rujuk dan iddah .....	217
a. Talak dan Rujuk melalui Surat.....	217
b. Talak yang Dijatuhkan karena Emosi .....	225
c. `Iddah .....	229
4. Fatwa Tentang Penerapan Teknologi Dalam Perkawinan...	231
a. Titip Anak pada Kandungan Istri Kedua .....	231
b. KB menurut Muhammadiyah.....	238
5. Fatwa tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) .....	245
C. Konstruksi Pemikiran Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah .....	251



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bab V	Penutup .....	256
	A. Kesimpulan .....	256
	B. Saran .....	257
Daftar Pustaka .....		260





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## Konstruksi Hukum Islam di Indonesia: Studi Terhadap Fatwa-Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Tentang Hukum Keluarga (1980-2017)

### Abstraksi

Salah satu topik yang kini selalu menjadi bahan diskusi para ahli Hukum Islam di Indonesia adalah hukum keluarga. Muhammadiyah sebagai organisasi Islam di Indonesia memiliki peran vital dalam merumuskan fatwa-fatwa tentang hukum keluarga. Penelitian Disertasi ini fokus pada fatwa-fatwa tarjih tentang hukum keluarga kecuali hukum kewarisan dari tahun 1980-2017. Pokok masalah yang dibahas dalam disertasi ini adalah bagaimanakah konstruksi Hukum Islam menurut Majelis Tarjih dan Tajdid dalam aspek hukum keluarga di Indonesia? Dan metodologi apa yang diterapkan dalam melakukan ijtihad terhadap kasus-kasus hukum keluarga?. Adapun landasan teori yang dipergunakan untuk meneliti disertasi ini ada dua: pertama, metode konvensional yakni ushul fikih yang dalam konteks ini adalah manhaj tarjih Muhammadiyah. Kedua, metode pembaruan hukum keluarga kontemporer. Metode pembaruan hukum keluarga kontemporer meliputi; *takhshîs al-qadhâ* (hak penguasa untuk memutuskan dan penguatan putusan pengadilan, *takhayyur* atau *talfîq*, *siyâsah syar`iyyah*, re-interpretasi, dan keputusan pengadilan, Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah menerapkan kedua teori tersebut secara bersamaan, dalam arti setiap menetapkan fatwa menerapkan metode konvensional yang terkadang hasilnya merupakan temuan baru atau re-interpretasi dan juga mendukung penuh aturan-aturan kenegaraan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan yang menjadi tujuan Hukum Islam. Dapat diambil contoh adalah fatwa tentang nikah di bawah tangan (nikah sirri) dan perceraian di luar sidang pengadilan agama. Majelis Tarjih dan Tajdid berijtihad dengan dalam kedua fatwa ini dengan menggunakan metode konvensional yang kemudian berkesimpulan bahwa pencatatan perkawinan di KUA dan perceraian melalui sidang pengadilan adalah bagian dari re-interpretasi demi terwujudnya mashlahah. Secara bersamaan pencatatan perkawinan dan perceraian di pengadilan agama telah diatur oleh Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Undang-Undang Peradilan Agama. Sifat dan Kepribadian Muhammadiyah adalah taat hukum dan perundang-undangan.





## Construction of Islamic Law in Indonesia: a study of Fatwas Tarjih Council and Tajdid Muhammadiyah about Family Law (1980-2017)

### Abstract

Nowadays, one of the topics that always becomes the material of discussion by Islamic jurist in Indonesia is family law. Muhammadiyah as an organization Islam in Indonesia has a vital role in formulating fatwas about family law. This dissertation research focuses on Tarjih fatwas about family law, except inheritance law from 1980-2017. The main problem that is discussed in this dissertation is how the construction of Islamic Law according to Majelis Tarjih and Tajdid in the aspect of family law in Indonesia? And what methodology that is applied in doing ijtihad for family law cases? There are two theoretical frameworks used in this dissertation research: First, the conventional method namely Ushul Fiqih which in this context is Manhaj Tarjih Muhammadiyah. Second, renewal method of contemporary Family Law. It includes; takhshîs al-qadhâ (leader's authority to decide and strengthen court decisions, takhayyur or talfiq, siyâsah syar'iyah, re-interpretation, and court decisions), Tarjih Council and Tajdid Muhammadiyah implement the two theories simultaneously, This means that when establishing a fatwa, it applies a conventional method which sometimes resulting new finding or re-interpretation and also fully supports of state regulations to realize the benefit that be the goal of Islamic law. For example, Fatwa of under-hand marriage (nikah sirri) and divorce outside the religious court. Tarjih and Tajdid Council berijtihad in which these two fatwas by using convention method makes conclusion that marriage registration in KUA and divorce through court are part of the re-interpretation for the realization of Mashlahah. At the same time registration of marriage and divorce in a religious court have been regulated by the Marriage Law, Compilation of Islamic Law (KHI), and the Law of Religious Courts. Muhammadiyah's character and personality are obey laws and regulations.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## بناء الشريعة الإسلامية في إندونيسيا: دراسة تحليلية في فتاوى مجلس الترجيع

### والتجديد المحمدية حول قانون الأسرة (1980-2017م)

#### التجديد

من أهم الموضوعات التي مازالت في نقاش من قبل أهل العلم في الشريعة الإسلامية في إندونيسيا هو قانون الأسرة. محمدية هي كمنظمة إسلامية في إندونيسيا لها دور مهم في فتاوى حول قانون الأسرة. يركز هذه الرسالة على فتاوى ترجيح في قانون الأسرة، أي إلا قانون الميراث 1980-2017م. المباحث الرئيسية التي نوقشت في هذه الرسالة هي كيف يتم بناء الشريعة الإسلامية عند مجلس الترجيح والتجديد في جوانب قانون الأسرة في إندونيسيا؟ وما هي المنهجية المتبعة في الاجتهاد في قضايا قانون الأسرة؟ لذلك هناك أساسان نظريان يستخدمان في البحث في هذه الرسالة: أولاً ، الطريقة التقليدية ، وهي أصول الفقه والتي في هذا السياق هي من المنهج المحمدية. ثانياً، الأساليب المعاصرة لإصلاح قانون الأسرة. تشمل أساليب إصلاح قانون الأسرة المعاصرة ما يلي: تخصيص القضاة (أي حق الحاكم في تقرير وتعزيز قرارات المحكمة)، التخيير أو التلفيق ، الياسة الشرعية، إعادة التفسير، وقرارات المحاكم. يطبق مجلس الترجيح والتجديد المحمدية نظريتين في نفس الوقت ، بمعنى أن كل منهما يُطبق النص على الفتوى الطريقة التقليدية التي تؤدي في بعض الأحيان إلى نتائج جديدة أو إعادة تفسير ، كما تدعم بشكل كامل أنظمة الدولة من أجل تحقيق المنفعة التي هي من أهداف الشريعة الإسلامية. ومن الأمثلة على ذلك الفتاوى المتعلقة بالزواج الباطل (نكاح سري) والطلاق خارج المحكمة الشرعية. لقد اجتهاد مجلس الترجيح والتجديد المحمدية بهاتين الفتاوى باستخدام الأساليب التقليدية التي خلصت بعد ذلك إلى أن تسجيل الزواج في المحكمة الدولية وكذلك الطلاق عبر المحكمة هما جزء من إعادة التفسير من أجل تحقيق المصالح قانون الزواج. وفي نفس الحال، فإن تسجيل حالات الزواج والطلاق في المحاكم الدينية ينظمه قانون الزواج وتجميع الشريعة الإسلامية وقانون المحاكم الدينية. محمدية كجمعية بشخصيتها هي طاعة القوانين والأنظمة.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang mengatur segala aspek kehidupan manusia dari akidah, ibadah, dan muamalah. Ketiga aspek ini adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain. Dalam konteks muamalah, dalam hal ini adalah hukum keluarga merupakan bagian penting dalam pribadi umat Islam sebagai bagian dari kepatuhan dalam beragama, sehingga terbentuklah praktik keseharian sesuai dengan tuntunan Islam dan adat istiadat masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan ruh ajaran Islam. Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, sejak Islam masuk ke negeri ini telah mengamalkan ajaran Islam, termasuk di dalamnya hukum keluarga. Menurut Hamka, sebagaimana dikutip oleh Ahmad Azhar Basyir, sejak masuknya Islam di Indonesia, Hukum Islam merupakan hukum yang berlaku di Nusantara. Seiring berkuasanya VOC, Hukum Islam tetap berlaku meskipun mengalami pasang surut yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah VOC dalam hukum bagi pribumi, termasuk hukum keluarga.<sup>1</sup> Fakta sejarah yang panjang ini adalah bukti konkrit telah ada pengamalan permanen atau konstruksi sosial dalam hukum keluarga di Indonesia. Hukum keluarga yang telah terlembagakan dalam sistem sosial umat Islam di Indonesia adalah perpaduan Islam sebagai agama wahyu yang berkolaborasi dengan tradisi masyarakat Indonesia.

<sup>1</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Dari Masa ke Masa*, dalam, Moh. Mahfud MD, et al (Ed), *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Cet. I, (Yogyakarta: UII Press, 1993), hlm. 6.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam adalah agama yang relevan dengan segala keadaan dan zaman (*shālihun likulli makān wa zamān*). Dalam keadaan apapun dan kondisi apapun, tidak ada alasan ajaran Islam tidak bisa diterapkan. Hal ini adalah merupakan inti dari ruh ajaran Islam yang *rahmatan li al-`ālamîn*. Elastisitas ajaran Islam tercermin dalam konsep Hukum Islam yang dikenal dengan istilah *ijtihad* atau *istinbāth* terhadap berbagai persoalan yang muncul di tengah-tengah umat. Dalam bidang mu`amalah, yang mana dalam wilayah ini mengandung nilai-nilai *ta`aqquli*, umat Islam dituntut untuk melakukan *ijtihad* guna membumikan ketentuan- ketentuan Hukum Islam<sup>2</sup>

Salah satu instrumen Islam dalam menjembatani berpadunya Islam sebagai wahyu dan realita sosial adalah *ijtihad*. *Ijtihad* yang secara bahasa berarti kegiatan, kerajinan, pencurahan tenaga dan pikiran<sup>3</sup>, secara istilah diartikan oleh Imam Ghazali sebagaimana dikutip oleh Amiur Nurudin sebagai pencurahan segala daya usaha dan penumpahan segala kekuatan untuk menghasilkan sesuatu yang berat atau sulit.<sup>4</sup> Menyempurnakan pengertian *ijtihad* sebagai telah disebutkan di atas, Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah mendefinisikan *ijtihad* hukum adalah mencurahkan segenap kemampuan berpikir dalam menggali dan merumuskan hukum *syar`i* yang bersifat *zhanni* dengan menggunakan seperangkat metode yang dilakukan oleh yang berkompeten baik dari sisi metodologis maupun permasalahan yang

<sup>2</sup> Fathurrahman Jamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997), Cet. Ke-1, hlm. 52.

<sup>3</sup> Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), Cet. Ke-14, Hlm 217-218

<sup>4</sup> Amiur Nurudin, *Ijtihad Umar Ibn Al-Khaththab; Studi tentang tentang Perubahan Hukum Dalam Islam*, Cet. 1, (Jakarta: Rajawali Press, 1991), Cet. Ke-1, Hlm 52.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

muncul di lapangan kehidupan.<sup>5</sup> Sepaham dengan pemahaman di atas, adalah Muhammad Iqbal, Sang pemikir Islam modern, ketika membicarakan prinsip gerak dalam struktur agama Islam, ia mengidentikkan ijtihad dengan *mujāhadah*,<sup>6</sup> sebagaimana tersurat dalam QS. Al-Ankabut ayat (29): 69:

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ

“Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. dan Sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik”.<sup>7</sup>

Atas dasar ini, ijtihad bukanlah merupakan sumber Hukum Islam melainkan sebagai metode penetapan Hukum Islam, sedangkan fungsi ijtihad dalam Islam adalah sebagai metode untuk merumuskan ketetapan-ketetapan Hukum Islam yang belum terumuskan dalam Al-Qur`an dan As-Sunnah.<sup>8</sup> Begitu penting arti dan peran ijtihad dalam Islam, Syaikh Khudhari Bik menyatakan bahwa ijtihad hukumnya ada tiga (3) macam yakni; wajib *`ain*, tentu bagi ulama yang memenuhi syarat-syarat sebagai mujtahid, wajib *kifāyah*, dan adakalanya sunah atau bersifat anjuran. Perubahan status hukum berijtihad ini seiring dengan tuntutan dan kondisi nilai urgensi fatwa itu sendiri.<sup>9</sup> Dari segi tinjauan pikiran, ijtihad merupakan faktor yang sangat penting bagi pembinaan dan perkembangan Hukum Islam. Hal ini mengingat nash-nash syari`at sangat terbatas jumlahnya, sementara perubahan sosial

<sup>5</sup> Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, *Naskah Musyawarah Nasional Tarjih ke-27 Tarjih Muhammadiyah*, Universitas Muhammadiyah Malang, 2010, hlm. 101.

<sup>6</sup> Amiur Nuruddin, *Ijtihad*, hlm. 52

<sup>7</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur`an dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra, 2002).

<sup>8</sup> Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, *naskah Musyawarah*.,

<sup>9</sup> Asy-Syaikh Muhammad Khudhary Bik, *Ushūl al-Fiqh*, (Mesir: At-Tijāriyah Al-Kubrā, 1969), Cet. Ke-6, Hlm 367.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

begitu cepat sehingga banyak masalah-masalah yang memerlukan jawaban statusnya dalam Hukum Islam (*masāil al-fiqhiyyah al-ijtimā'iyah*).<sup>10</sup>

Para ulama Hanabilah berprinsip sebagaimana dipaparkan oleh Asy-Syātibi, bahwa tidak boleh ada kekosongan Mujtahid di setiap kurun zaman.<sup>11</sup> Dalam berijtihad, ada dua (2) hal yang sangat diperlukan, pertama, mujtahid, yakni orang yang memiliki syarat-syarat untuk berijtihad, dan kedua, sumber-sumber dalil yang menjadi pijakan dalam berijtihad agar tidak menyelsihi prinsip-prinsip ajaran Islam.

Ijtihad, pada kenyataannya tidak hanya merambah pada persoalan yang belum ada *nash*-nya saja, melainkan juga menyangkut masalah-masalah yang sudah ada ketetapanannya secara tekstual pada Al-Qur'an dan Hadis Nabi. Dalam perjalanan sejarah perkembangan Hukum Islam, tidak bisa dilepaskan dari peranan fatwa dari seorang *mufthi* secara sendirian maupun secara kolektif. Ijtihad secara kolektif saat ini lebih memiliki urgensi yang sangat tinggi dalam memelihara syariat. Di antara yang paling menonjol dalam hal ini adalah prinsip musyawarah, keakuratan dan kecermatan apabila dibanding dengan ijtihad secara sendirian. Lebih dari itu, model ijtihad ini dirasa memberi kemudahan untuk melangsungkan tradisi ijtihad yang merupakan unsur yang tidak terpisahkan dalam ajaran Islam serta menahan kemungkinan terjadinya tertutupnya ijtihad.<sup>12</sup>

Dalam konteks Indonesia, peran organisasi Islam yang secara nyata memiliki basis masa yang jelas, fatwa memiliki peran strategis sebagai

<sup>10</sup> A. Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1991). Cet. Ke-6, hlm 163.

<sup>11</sup> Abú Ishāq Al-Syātibi Ibrhîm bin Músā Al-Husnî Al-Mālikî, *Al-Muwāfaqāt Fî Ushûl Al-Syarî'ah*, (Libanon: Dār Al-Kutub Al-'Arābiyyah, 2003). Cet. Ke-3, Jilid 4, hlm 64.

<sup>12</sup> Abdul Majid Asy-Syarafi, *Al-Ijtihād al-Jamā'î Fî al-Tasyrî' al-Islāmî*. Terj. Abduh Zulfidar Akaha, Cet. I, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), hlm. 53.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengembangan ajaran Islam. dalam hal ini, Fatkhul Mujib menjelaskan dalam satu tulisannya.

Fakta yang demikian ini menjadi lebih menarik lagi jika ditinjau dengan keberadaan organisasi massa seperti NU dan Muhammadiyah yang eksistensi dan perannya memiliki kontribusi besar dalam membentuk paradigma keberagamaan masyarakat muslim Indonesia. Corak ormas tersebut kemudian mampu memberikan diversifikasi jika dibandingkan dengan *mindset* sektarian yang ada di negara-negara Islam Timur Tengah. Di mana isu-isu sektarian lebih bersifat radikal, fanatis sempit, serta begitu kentalnya nuansa politis yang kemudian membentuk kotak-kotak komunitas yang rentan konflik. Hal tersebut tentu berbanding terbalik dengan keberadaan ormas keagamaan di Indonesia yang sekalipun sangat mengakar dan memiliki pengaruh besar di tengah masyarakat namun dari tinjauan sejarah justru menunjukkan peran besar dan begitu akomodatifnya ormas-ormas tersebut dalam menjaga stabilitas negara. Dengan demikian maka tidak mengherankan jika posisi strategis ormas tersebut kemudian direfleksikan dalam kedudukannya yang juga dinilai memiliki otoritas pemberi fatwa bahkan lebih dipilih oleh masyarakat dibandingkan dengan MUI yang secara institusi lebih “formil”.<sup>13</sup>

Salah satu topik yang kini selalu menjadi bahan diskusi oleh para ahli Hukum Islam di Indonesia adalah persoalan hukum keluarga. Sirajudin dalam salah satu artikelnya menuliskan :

Eksistensi hukum Islam dalam konteks keluarga di Indonesia cukup terbuka disebabkan antara lain oleh Undang-undang Dasar atau konstitusi yang mengarahkan terjadinya pembaharuan atau

<sup>13</sup> Fatkhul Mujib, Perkembangan Fatwa di Indonesia, *Nizham* Vol. 4, Nomor 1, Januari-Juni 2015, hlm. 96.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengembangan hukum keluarga, agar kehidupan keluarga yang menjadi sendi dasar kehidupan masyarakat, terutama kehidupan wanita, isteri, ibu dan anak-anak yang dapat terlindungi dengan adanya kepastian hukum. Hukum Islam bidang keluarga di Indonesia maupun Negara- negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam memiliki daya tarik tersendiri, sebab, dalam hukum keluarga itulah yang paling mendapatkan prioritas di kalangan umat Islam di Indonesia.<sup>14</sup>

Muhammadiyah sebagai organisasi besar dan tertua di Indonesia berdiri sejak 18 November 1912 bertepatan dengan 08 Dzulhijjah 1330 H memiliki peran strategis dalam membina umat Islam untuk menjalani kehidupan sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. KH. Ahmad Dahlan sebagai pendiri organisasi ini telah menancapkan ruh pembaruan dalam kehidupan keagamaan agar kembali kepada sumber utama agama Islam yakni al-Quran dan As-Sunnah.<sup>15</sup>

Muhammadiyah sejak awal berdirinya sangat dikenal dengan jargonnya kembali kepada Al-Qur`an dan As-Sunnah, sehingga acap kali disalah artikan sebagai organisasi Islam yang skriptualis-literalis dalam memahami sumber pokok ajaran Islam tersebut. Pada sisi lainnya, semangat tajdid yang juga sudah melekat dalam diri Muhammadiyah, yakni puritan dalam akidah dan ibadah dan fleksibel selain kedua bidang tersebut, menjadikan Muhammadiyah mampu beradaptasi bahkan mampu merancang perubahan konstruksi pemikiran keagamaan dengan tetap merujuk kepada kedua sumber ajaran Islam. Hukum keluarga yang dalam pembedaan fikih bukan termasuk ibadah ritual, tidak menutup kemungkinan untuk selalu mengalami pergeseran baik pendekatan maupun orientasi fatwa atau ijtihad

<sup>14</sup> Sirajudin, Kontruksi Hukum Keluarga Islam di Indonesia: Analisis Terhadap Undang-Undang RI No. I Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Istinbath-Jurnal Hukum Islam*, Vol. 14, No. 2, Desember 2015, hlm. 159.

<sup>15</sup> Syamsul Hidayat, dkk, *Studi Kemuhammadiyah: Kajian Historis, Ideologis, dan Organisatoris*, Cet. I (Surakarta: Lembaga Pengembangan Ilmu-Ilmu Dasar UMS, 2009), hlm. 29.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai upaya untuk mencapai kemaslahatan umat dalam menghadapi arus perubahan kemajuan peradaban yang sangat dinamis.

Majelis Tarjih, kini berubah nama menjadi Majelis Tarjih dan Tajdid (MTT) yang dibentuk pada tahun 1927 memiliki tugas dan tanggung jawab menyelesaikan masalah-masalah keagamaan.<sup>16</sup> Majelis Tarjih dan Tajdid kini telah melahirkan banyak fatwa keagamaan baik yang berkaitan dengan akidah, ibadah, maupun muamalah. Dalam tradisi Muhammadiyah dikenal tiga istilah dalam kaitannya fatwa agama; putusan tarjih, fatwa tarjih, dan wacana tarjih. Putusan adalah keputusan Hukum Islam yang diambil secara musyawarah di tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah, keputusan pada tingkat ini bersifat mengikat bagi seluruh warga Persyarikatan Muhammadiyah. Fatwa Tarjih adalah keputusan Hukum Islam yang diambil oleh tim yang dibentuk oleh Majelis Tarjih Pimpinan Pusat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada Majelis Tarjih Pusat. Meski Fatwa tarjih ini berada di bawah Putusan, namun tetap menjadi pedoman bagi warga Muhammadiyah. Sedangkan wacana tarjih adalah pendapat-pendapat dari perorangan anggota Majelis Tarjih.<sup>17</sup> Dari ketiga istilah tersebut, pertama dan kedua yang menjadi pedoman resmi organisasi.

Menurut penelusuran penyusun, Majelis Tarjih dan Tajdid (MTT) telah memberikan putusan-putusan dan fatwa-fatwa cukup banyak yang berkaitan dengan Hukum Keluarga Islam. Temuan menarik dalam kaitannya Hukum Keluarga Islam adalah fatwa Majelis Tarjih tentang Nikah Sirri (nikah

<sup>16</sup> Syariffudin Jurdi, dkk, *I Abad Muhammadiyah: gagasan Pembaruan Sosial Keagamaan*, Cet. I, (Jakarta: Kompas, 2010), hlm. 103.

<sup>17</sup> Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, Cet. I (jakarta: RM Book, 2007), hlm. 323.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di bawah tangan). Dalam pandangan majelis ini, nikah di bawah tangan adalah tidak syah menurut syariah. Fatwa ini terhitung sangat progresif dan berani mendobrak paradigma *mains-tream* fikih perkawinan selama ini. Karena itu, bagi warga Muhammadiyah khususnya dan umat Islam yang mengikuti pandangan Muhammadiyah wajib hukumnya mencatatkan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA).<sup>18</sup> Fatwa ini selaras dengan salah satu kepribadian Muhammadiyah yakni mengindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan, serta dasar dan falsafah negara yang sah.<sup>19</sup>

Fatwa ini lebih tegas apabila dibanding dengan pandangan-pandangan lembaga fatwa yang lain semisal Majelis Ulama Indonesia. Dalam Fatwa MUI Nomor 10 tahun 2008 tentang Nikah Di Bawah Tangan sebagai berikut :

Nikah di bawah tangan adalah sah karena telah terpenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika terdapat madharat. Pernikahan harus dicatatkan secara resmi pada instansi berwenang sebagai langkah preventif untuk menolak dampak negatif/ *madharat (saddan lidz dzari`ah)*.<sup>20</sup>

Fatwa MUI ini tetap memandang syah nikah di bawah tangan, karena dianggap telah terpenuhi syarat rukunnya. Kewajiban pencatatan perkawinan sebagaimana tercantum di poin terakhir, tetap saja tidak tidak mempengaruhi keabsahan nikah di bawah tangan. Pandangan mayoritas terkait dengan nikah di bawah tangan adalah tetap syah secara syariah namun bermasalah secara hukum kenegaraan.

Temuan menarik lainnya adalah putusan tarjih Muhammadiyah tentang peran perempuan tepatnya pada Mukhtamar Tarjih di Garut pada tanggal 18-23

<sup>18</sup> Tim Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Fatwa-fatwa Tarjih: Tanya jawab Agama*, Cet. I (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2017), Jilid 8, hlm. 45-52.

<sup>19</sup> Haedar Nashir, *Manhaj Gerakan Muhammadiyah: Ideologi, Khittah, dan langkah*, Cet. III (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2013), hlm. 45.

<sup>20</sup> Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*, Cet. I (Surabaya: Erlangga, 2011), hlm. 534.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

April 1976, yang terkenal dengan kitab “Adabul Mar’ah Fil Islam”. Dalam putusan ini, Muhammadiyah menempatkan perempuan pada ranah domestik yakni ibu rumah tangga pada satu sisi dan membolehkan perempuan berkiprah di ranah publik pada sisi yang lain. Dengan semangat dan pemaknaan baru, Muhammadiyah membolehkan perempuan menjadi hakim dengan syarat memiliki kemampuan.<sup>21</sup> Dalam sebuah *halaqah*, Muhammadiyah juga pernah berdiskusi khusus terkait dengan fiqh perempuan baik di ranah ibadah, rumah tangga, hingga publik.<sup>22</sup> Tidak hanya berhenti di sini, secara perorangan banyak juga anggota Majelis Tarjih juga membahas fiqh perempuan dalam kaitannya ranah domestik dan publik.<sup>23</sup> Putusan dan wacana ini urgen untuk ditampilkan sebagai landasan penguatan pemilihan judul karena peran perempuan di kancah publik erat kaitannya dengan peran dan tanggung jawab perempuan dalam keluarga.

Keputusan fatwa Hukum Islam oleh Muhammadiyah tersebut secara sepintas lalu mengalami sebuah pergeseran dari cara pandang mayoritas ulama terdahulu dan pada sisi yang lain sangat mempengaruhi konstruksi pemikiran Hukum Islam di Indonesia, mengingat organisasi ini memiliki basis masa yang cukup signifikan di Indonesia, bahkan kini telah memiliki kepengurusan di sejumlah negara.

Dalam kaitan ini, fatwa-fatwa Muhammadiyah tentang Hukum Keluarga Islam menarik untuk diteliti dengan alasan sebagai berikut :

<sup>21</sup> Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Adabul Mar’ah Fil Islam* Cet. II (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2010)

<sup>22</sup> Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Wacana Fiqh Perempuan Dalam Perspektif Muhammadiyah*, Cet. I, (Jakarta: UHAMKA Press, 2005)

<sup>23</sup> Muhammad Rofiq Mudzakir, *Problematisa Fiqih Perempuan*, Cet. I, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2014)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Muhammadiyah sebagai organisasi Islam yang sejak berdirinya memiliki jargon kembali kepada Al-Qur`an dan As-Sunnah yang mana dengan jargon ini Muhammadiyah acap kali diasumsikan oleh sebagian kalangan sebagai salah satu paham keagamaan yang secara tekstual mengacu pada dua sumber utama dalam menjawab berbagai permasalahan agama yang muncul.
2. Fatwa-fatwa dalam Hukum Keluarga Islam, pada tahap awal penelusuran justru ditemukan fatwa-fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah yang memiliki pandangan progresif dan rasional sesuai dengan konteks tuntutan sosial dalam memaknai teks-teks Al-Qur`an dan As-Sunnah.
3. Majelis Tarjih dan Tajdid (MTT) Muhammadiyah dengan jargon tajdid yang melekat pada dirinya, telah banyak melakukan rekonstruksi pemikiran dalam bidang hukum keluarga, misalnya dalam fatwa tentang nikah *sirri* atau nikah di bawah tangan yang cukup progressif dan berbeda dengan lembaga fatwa yang lain.

**B. Pembatasan Dan Perumusan Masalah**

Bertitik tolak dari latar belakang di atas, maka studi ini akan menfokuskan penelitian pada fatwa-fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah yang ada hubungannya dengan Hukum Keluarga Islam. Menurut kesimpulan Khoirudin Nasution, secara limitatif, Hukum Keluarga Islam mencakup lima hal: pertama, perkawinan yang mencakup peminangan, syarat dan rukun nikah, mahar, mahram, dan status nikah. Kedua, kehidupan rumah tangga yang mencakup hak dan kewajiban suami istri, dan termasuk di

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalamnya hubungan orang tua dan anak, poligami, dan nafkah. Ketiga, perceraian yang mencakup; perselisihan suami istri, khuluk dan talak. Serta iddah. Keempat, pengasuhan anak, dan kelima, warisan yang mencakup: waris, wasiyat, dan wakaf.<sup>24</sup> Adapun untuk membatasi ruang lingkup pembahasan, penelitian ini fokus pada poin pertama sampai poin keempat. Sedangkan poin kelima yang mencakup warisan, wasiyat, dan wakaf tidak menjadi penelitian disertasi ini. Dari segi waktu, penelitian ini membatasi pada fatwa-fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah sejak tahun 1980 hingga 2017.

Adapun persoalan pokok yang ingin diketemukan jawabannya pada penelitian penulisan disertasi ini adalah sebagai berikut;

1. Bagaimanakah konstruksi Hukum Islam menurut Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dalam aspek Hukum Keluarga Islam di Indonesia?
2. Metodologi apa yang dipergunakan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dalam melakukan ijtihad terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan Hukum Keluarga?.

### C. Tujuan Dan Signifikansi

#### 1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan :

##### a. Tujuan Akademis

Penelitian ini bertujuan untuk memahami konstruksi Hukum Keluarga menurut Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah secara

<sup>24</sup> Khoirudin Nasution, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, Cet. I (Yogyakarta: Academia + Tazzaffa, 2010), hlm. 15-16.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

utuh dan implementasi metode *istinbāth al-ahkām* yang digunakan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid (MTT) Muhammadiyah dalam sejumlah fatwa yang berkaitan dengan Hukum Keluarga yang diteliti dalam penelitian disertasi ini. Pada tataran berikutnya, mengetahui di mana letak metode pembaruan hukum keluarga Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dalam konteks peembarua hukum keluarga kontemporer.

## b. Tujuan Terapan

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan konstruksi Hukum Keluarga Islam dalam pandangan Muhammadiyah secara holistik atau secara utuh sehingga dapat dijadikan tuntunan bagi warga Muhammadiyah pada khususnya dan umat Islam pada umumnya, mengingat konstituen organisasi ini meliputi seluruh wilayah Indonesia dan bahkan kini memiliki cabang istimewa di sejumlah negara.

## 2. Signifikansi

## a. Signifikansi Secara Akademis.

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi sebuah bahan yang berbobot secara akademis untuk dijadikan referensi bagi dosen, mahasiswa yang ingin mengkaji pemikiran Hukum Keluarga Islam perspektif Muhammadiyah berikut metodologi ijtihad yang diterapkan. Hal ini sangat berpeluang karena sumber-sumber referensi dan kajian yang cukup komprehensif tentang Hukum Keluarga Islam perspektif Muhammadiyah masih sangat terbatas. Meskipun sudah ada, penyajiannya belum secara utuh dan masih jauh dari harapan.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## b. Signifikansi Terapan.

Hasil penelitian ini akan memiliki kegunaan secara luas terutama untuk Majelis Tarjih dan Tajdid (MTT) Muhammadiyah, setidaknya hasil penelitian ini menjadi masukan positif sebagai bahan acuan ke depan dalam memutuskan status Hukum Keluarga Islam yang kelak akan muncul di tengah-tengah masyarakat. Dan juga diharapkan mampu menjadi masukan bagi para pegiat keluarga sakinah, baik dari penyuluh agama kementrian agama yang membidangi ini, ataupun lembaga-lembaga yang secara khusus menangani pembinaan keluarga sakinah.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### LANDASAN TEORITIS DAN TINJAUAN KEPUSTAKAAN

#### A. Landasan Teoritis

##### 1. Teori Konstruksi Sosial

Dalam menganalisa hukum keluarga sangat tepat dengan pendekatan teori konstruksi sosial. Teori ini melihat realitas dalam sistem sosial diciptakan melalui interaksi timbal balik yang menghasilkan sistem nilai dan keyakinan. Sistem nilai dan realita tersebut dipraktikkan secara berulang-ulang dalam masyarakat sehingga melekat dalam sistem yang pada tataran selanjutnya dianggap sebagai sebuah realita. Realita tersebut masuk ke dalam individu-individu melalui proses internalisasi, dipraktikkan berulang-ulang yang disebut eksternalisasi hingga melekat dalam institusi sistem sosial.<sup>25</sup> Hukum Islam pada umumnya dan hukum keluarga pada khususnya dipraktikkan sejak Islam diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW. Islam yang bersumber pada wahyu Tuhan mengalami interaksi panjang di bumi seiring dengan proses dakwah Islam dari Arab sampai ke berbagai belahan dunia termasuk di Indonesia. Pergulatan antara Islam sebagai agama wahyu dan Islam sebagai realita sosial adalah keniscayaan yang pada tataran selanjutnya terjadi modifikasi, akulturasi sesuai dengan konteks budaya masyarakat yang sangat variatif. Di sinilah letak urgensi penerapan teorikonstruksi sosial dalam penelitian ini. tentu saja dengan pisau analisis ushul fiqih dan adat istiadat masyarakat Indonesia sangat dominan dalam membaca konstruksi hukum

<sup>25</sup><http://fis.unj.ac.id/labs/sosiologi/teori-utama-sosiologi/> akses 6 Oktober 2020 jam 07.00

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keluarga yang terejawantahkan dalam kumpulan fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah. Berangkat dari analisa ushul fiqh dan adat istiadat masyarakat Indonesia tersebut dapat disimpulkan konstruksi hukum keluarga khas Indonesia.

## 2. Istilah-Istilah Yang Berkaitan Dengan Penelitian

- a. Hukum. Menurut S. M. Amin, sebagaimana dikutip oleh C. S. T Kansil, hukum adalah kumpulan-kumpulan peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi. Para ahli yang lain mendefinisikan hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan resmi yang berwajib, dan pelanggaran terhadap aturan tersebut berakibat diambil tindakan.<sup>26</sup> Dari definisi ini jelas bahwa hukum dalam pengertian umumnya adalah seperangkat aturan yang dibuat oleh badan resmi negara untuk ditaati oleh masyarakat.
- b. Hukum Islam menurut Hasbi Ash-Shiddieqy seperti dikutip Amir Syarifuddin adalah koleksi daya upaya para ahli hukum untuk menerapkan syariah atas kebutuhan masyarakat.<sup>27</sup> Menurut Ahmad Rofik, sebagaimana dikutip oleh Ashadi L. Diah, Hukum Islam adalah peraturan-peraturan yang dirumuskan berdasar wahyu Allah dan sunah Rasul-Nya tentang tingkah laku *mukallaf* yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi semua pemeluk Islam. Dengan demikian, kedudukan hukum Islam sangat penting dan menentukan pandangan

<sup>26</sup>C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet. ke-6 (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), hlm. 38.

<sup>27</sup>Ashadi L. Diah, *Dinamika Pemikiran Hukum Islam di Indonesia dan Tantangannya*, Jurnal Al-Adl. Vol. 8, No. 2, Juli 2015, hlm. 39

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hidup serta tingkah laku Muslim.<sup>28</sup> Keterangan di atas menggambarkan bahwa Hukum Islam merupakan pedoman hidup yang bersumber dari wahyu Allah baik yang tercantum dalam kitab suci Al-Qur`an dan hadis Nabi yang membutuhkan penerjemahan oleh para ahli agar dapat diterapkan dalam kehidupan oleh *mukallaf*. Dengan demikian, Hukum Islam tidak bisa lepas dari proses ijtihad dan dalil-dalil. Di bawah ini dijelaskan mengenai dalil-dalil Hukum Islam, sistem pengambilan hukum menurut mazhab-mazhab dalam Islam secara memadai yang dalam penelitian ini akan memudahkan dalam menganalisa fatwa-fatwa tarjih Muhammadiyah.

- c. Hukum Keluarga. Menurut Abdul Wahhab Khallaf sebagaimana dikutip oleh Khoiruddin Nasution adalah hukum yang mengatur kehidupan keluarga, yang dimulai dari awal pembentukan keluarga yang bertujuan untuk mengatur hubungan suami istri, dan anggota keluarga.<sup>29</sup> Adapun batasan dan ruang lingkup hukum keluarga telah dijelaskan pada bab pendahuluan.
- d. Tarjih. Secara bahasa tarjih berasal dari *rajja-ha-yurajji-hu-tarjih* yang berarti membeikan penguatan kepada yang lain sehingga menjadi kuat. Menurut Muhammad Wafa sebagaimana dikutip oleh Imran Rosyadi, secara bahasa tarjih adalah mengunggulkan sesuatu dengan lebih condong padanya dan memenangkannya. Adapun secara istilah, tarjih adalah menguatkan salah satu dari dua dalil atau pendapat agar diketahui lebih kuat. Dengan kata lain, tarjih adalah memilih salah satu

<sup>28</sup> *Ibid*

<sup>29</sup> Khoiruddin Nasution, *Pengantar dan Pemikiran*., hlm. 7-8.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendapat atau dalil dari dua atau lebih yang lebih kuat dan selanjutnya diamalkan.<sup>30</sup>

- e. Tajdid. Secara bahasa istilah ini berasal istilah ini berarti pembaruan. Bahkan istilah tajdid atau pembaruan ini sudah melekat dalam diri Muhammadiyah sejak berdirinya hingga saat ini. konsep pembaruan Muhammadiyah tidak terlepas dari pengusung gagasan ini yakni KH. Ahmad Dahlan sebagai tokoh central sekaligus pendiri organisasi ini.<sup>31</sup> Perlu dijelaskan bahwa arti tajdid dalam Muhammadiyah itu memiliki dua orientasi; yakni pengembalian kepada yang asli untuk pokok-pokok akidah dan ibadah, lebih tepatnya purifikasi, dan dinamisasi kehidupan sosial dan peradaban berlandaskan kepada penemuan kembali substansi agama.<sup>32</sup> Berdasarkan konsep tajdid yang khas ini, Muhammadiyah sangat ketat dan puritan dalam masalah akidah dan ibadah, sebaliknya sangat dinamis di selain dua masalah tersebut. Dengan berbekal konsep tajdid inilah, Muhammadiyah mampu bertahan menghadapi perubahan zaman bahkan mampu memberikan solusi teologis sebagai upaya merekonstruksi peradaban dengan tetap menuruk kepada sumber ajaran Islam yakni Al-Qur`an dan as-Sunnah.
- f. Fatwa. Menurut KH. Anwar Ibrahim, fatwa adalah jawaban atas pertanyaan seseorang yang ingin mendapatkan kejelasan hukum suatu masalah. Fatwa biasanya berupa jawaban yang singkat dan disertai

<sup>30</sup>Imron Rosyadi, Tarjih Sebagai Metode: Prespektif Usul Fiqih, *Ishraqi*, Volume 1 No. 1 Januari 2017.

<sup>31</sup>Konsep Pembaruan Muhammadiyah (1), <http://republika.co.id/berita/m8p4as/konsep-pembaruan-muhammadiyah-1>, akses 5 Juni 2020 jam 07.00 wib.

<sup>32</sup>Faozan Amar dkk, editor, *Reaktualisasi dan Kontekstualisasi Islam Berkemajuan di Tengah Peradaban global*, Cet. I (Jakarta: Al-Wasat Publishing House, 2012), hlm. 25.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalil-dalil agama karena tujuannya adalah memberikan penjelasan kepada penanya supaya dia dapat langsung melaksanakan ajaran Islam. selanjutnya yang memiliki otoritas mengeluarkan fatwa adalah ulama yang memiliki persyaratan tertentu.<sup>33</sup>

- g. Ijtihad. Ijtihad secara *lughah* berasal dari kata kerja *jahada-yajhadu*, berentuk mashdarnya *jahdan* yang berarti pengerahan segala kesanggupan untuk mengerjakan sesuatu yang sulit. Secara terminologi ijtihad menurut Khudhari Bek sebagaimana dikutip oleh Huzaemah Tahido Yanggo, pengerahan kemampuan menalar dari seorang ahli fikih dalam mencari-cari hukum syar'i.<sup>34</sup> Dari sisi ruang lingkup, ijtihad ada yang *mustaqil*, *muntashib*, dan *tarjih*. Apabila dibandingkan dengan fatwa, ijtihad lebih berat syarat-syaratnya karena untuk mencapai derajat mujtahid diperlukan persyaratan yang berat yakni mampu mengeluarkan hukum dari nash Al-Qur'an dan hadis. Sedangkan fatwa meskipun diperlukan persyaratan tertentu, tetapi karena fatwa sifatnya adalah jawaban terhadap persoalan keumatan yang muncul. Dalam hal ini seorang mufti bisa saja langsung merujuk kepada pendapat ulama yang sudah ada.

Segala hal yang berkaitan dengan istilah-istilah yang telah disebutkan di atas, kesemuanya merujuk kepada sumber-sumber ajaran Islam yakni Al-Qur'an dan hadis dan metode-metode yang bersangkutan

<sup>33</sup><https://republika.co.id/berita/oaxd0z313/apakah-sebenarnya-fatwa-itu>, akses 5 Juni 2020 jam 07.30.

<sup>34</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazahb*, Cet. IV (Jakarta: Gaung Persada Press, 2011), hlm. 1-2.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

paut dengan kedua sumber tersebut. Adapun dalil-dalil hukum Islam dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai-berikut:

### 3. Metode Pembaruan Hukum Keluarga Kontemporer.

Dalam khazanah pemikiran hukum keluarga dikenal dua metode pembaruan yakni metode konvensional dan metode kontemporer. Pada bagian ini dipaparkan secara memadai kedua macam metode pembaruan tersebut.

#### a. Metode Konvensional.

Metode pembaruan konvensional adalah metode yang dipakai pada umumnya dalam ijtihad atau pembaruan pada umumnya. Dalam konteks ini para ahli bersepakat bahwa Muhammad bin Idris al-Syāfi'i (150-204/ 767-819) adalah peletak dasar ilmu ushul fiqh, sehingga *al-Risālah* dinobatkan sebagai kitab awal di bidang ushul fiqh meskipun belum sistematis seperti kajian ushul fikih era berikutnya.<sup>35</sup> Metode pembaruan Hukum Islam sejak awal adalah merupakan kekuatan yang dinamis dan kreatif para imam mazhab yang memiliki latar belakang sosio-kultural yang berbeda-beda. Menurut Taufik Adnan Admal sebagaimana dikutip oleh Jefry Tarantang, mazhab-mazhab dalam Hukum Islam bermunculan seperti misalnya Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambaliyah sebagai cerminan ketajaman metode atau paradigma yang dibangun oleh para imam pendiri mazhab masing-masing.. Hanafiyah dengan *istihsān*, Malikiyah dengan *mashlahah* yang di kemudian hari disempunakan oleh Al-

<sup>35</sup>Khoiruddin Nasution, Metode Pembaruan Hukum Keluarga Islam Kontemporer, *UNISIA*, Vol. XXX No. 66 Desember 2007.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syātibī dengan teori *maqāshid al-syarīʿah*, Syāfiʿiyyah dengan metode *qiyās*, dan Hambaliyah dengan metode literalnya, dan masih metode ijtihad para *fukaha* yang lainnya.<sup>36</sup> Secara prinsip dalam metode pembaruan fikih konvensional yang menjadi rujukan utamanya adalah Al-Qurʿan, hadis, *ijmāʿ*, dan *qiyās*, kemudian *istihsān*, *istishāb*, *mashlahah mursalah*, *ʿurf*, *fatwa sahabat*, *sad al-dzarīʿah*, dan *syarʿu man qablanaa*. Dalam bagian ini patut dijelaskan secara singkat metode-metode yang dipergunakan dalam pembaruan Hukum Islam konvensional sebagai berikut;

Para ahli Hukum Islam sepakat bahwa sumber Hukum Islam adalah Al-Qurʿan, As-Sunnah, Al-Ijmaʿ, dan al-Qiyas. Sumber ini mengacu pada QS. Al-Nisaʿ (04): 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ  
ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. An-Nisaʿ (04): 59).<sup>37</sup>

Abdul Wahhab Khallaf, ahli Hukum Islam Kontemporer mengomentari ayat di atas sebagai petunjuk berpegang kepada empat

<sup>36</sup>Jefry Tarantang, Teori dan Aplikasi Pemikiran Kontemporer Dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Islam, *Jurnal Transformatif*, <http://e-journal-iain-palangkaraya.ac.id/index.php/TF> Vol.2, No. 1 April 2018.

<sup>37</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qurʿan Dan terjemahnya, (Semarang: Toha Putra 2002)



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalil dalam ajaran Islam. kata taat kepada Allah dan Rasul pada ayat di atas adalah perintah untuk mengikuti al-Qur`an dan As-Sunnah. Sedangkan taat kepada *ulil amri* adalah mengikuti para kesepakatan imam mujtahidin dalam masalah hukum syariah yang lazim disebut dengan *ijma`*. Apabila terjadi perselisihan maka diperintahkan kembali kepada dua sumber utama yakni al-Qur`an dan As-Sunnah. Dalam proses seperti ini lazim disebut dengan *qiyas*.. Abdul Wahhab Khallaf mengutip sebuah hadis tentang dialog antara Nabi dengan Mu`adz bin Jabbal ketika hendak diutus ke Yaman untuk menduduki sebagai gubernur.<sup>38</sup>

Pertama, Al-Qur`an. Allah menurunkan Al-Qur`an kepada umat manusia melalui Rasulullah SAW sebagai kitab suci terakhir yang berfungsi sebagai pedoman hidup umat manusia yang tidak ada keraguan di dalamnya sedikitpun. Sebagai pedoman hidup, Al-Qur`an berisi tentang informasi mengenai hukum, etika, ilmu pengetahuan, antariksa, kedokteran dan seluruh ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Sebagian besar Al-Qur`an merupakan dasar-dasar hukum dan pengetahuan, manusialah yang berperan menganalisa dan memerinci, dan membuat garis besar kebenaran Al-Qur`an agar dapat dijadikan pedoman dalam menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dalam kehidupan nyata sehari-hari. Pada Era Rasulullah SAW sumber hukum Islam ada dua yakni Al-Qur`an dan sunnah. Rasulullah selalu menunggu wahyu untuk menyelesaikan kasus-kasus tertentu

<sup>38</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, Cet. XII (Kairo: Dār al-Qalam, TTP),

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang ditanyakan kepada beliau, namun jika wahyu tidak turun, beliau menetapkan masalah tersebut dengan sabdanya, yang secara prinsip juga wahyu Tuhan. Sebagai sumber hukum Islam pertama dan utama, Al-Qur`an berperan penting dalam upaya menetapkan hukum Islam terutama setelah meninggalnya Rasulullah SAW.<sup>39</sup> Tidak ada perbedaan pendapat semua kaum Muslimin tentang kehujjahan kitab suci ini sebagai sumber Hukum Islam yang salah satu dalil utamanya adalah QS. An-Nisa` (04): 59 sebagaimana dikutip pada halaman sebelumnya. Secara garis besar, Al-Qur`an mengandung tiga (3) ajaran pokok: rukun iman, rukun Islam, dan hukum muamalah pada umumnya yang meliputi perkawinan, waris, wasiat, makanan, transaksi jual beli, dan aturan-aturan yang berkaitan dengan hubungan antara sesama manusia.<sup>40</sup>

Kedua, Hadis Nabi. Menurut Maulana Muhamad Ali sebagaimana dikutip oleh A. Syafi`i Karim, Hadis (sunnah) secara bahasa berarti jalan, peraturan, sikap dalam bertindak dan bentuk kehidupan.<sup>41</sup> Pengertian tersebut masih sangat umum, untuk membatasi pengertian di atas, ulama ushul mengartikan hadis (sunnah) adalah apa yang lahir dari Muhammad selain dari Al-Qur`an yang berupa perkataan, perbuatan, dan persetujuan.<sup>42</sup> Fungsi sunnah atau hadis adalah pertama, sunnah berfungsi sebagai *bayān ta`kid*, artinya bahwa sunnah itu memperkokoh hukum-hukum yang telah ditetapkan

<sup>39</sup>Wet.if.unila.ac.16 dipost 11-05-2015 akses 22 Oktober 2020 pukul 16.50 wib.

<sup>40</sup>A. Syafi`i Karim, *Fiqih Ushul Fiqih*, Cet. II, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 59.

<sup>41</sup>*Ibid.*, hlm, 60.

<sup>42</sup>*Ibid.*

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam Al-Qur`an seperti perintah shalat, puasa, dan haji.. Kedua, sebagai *bayān tafshīl* yang berarti menjelaskan dan memerinci petunjuk global dalam Al-Qur`an seperti tata cara menjalankan shalat, puasa, dan haji. ketiga, *bayān tasyrī`* yang berarti bahwa sunnah dapat menentukan suatu hukum secara mandiri yang tidak disinggung oleh Al-Qur`an. Fungsi ketiga ini memang menjadi perdebatan di kalangan ulama, akan tetapi apabila kita telisik dalam Al-Qur`an, banyak sekali ayat-ayat yang menyuruh kita untuk mengikuti apa saja yang diperintahkan Nabi dalam sabdanya.<sup>43</sup> Muhammad Musthafa Azami menegaskan bahwa sunnah memiliki kedudukan yang sangat kuat sebagai sumber hukum Islam. menurutnya, Nabi Muhammad SAW memiliki otoritas penuh untuk memutuskan hukum atau aturan. Pandangannya ini didasarkan pada QS. Al-A`raf: 157-158, QS. Al-Hasyr: 7, dan QS. L-Najm: 3-4.<sup>44</sup>

Dari segi bentuknya sunnah ada tiga perkara yakni sunnah *qauliyah* atau perkataan, sunnah *fi`liyah* atau perbuatan, dan sunnah *taqrīriyyah* atau persetujuan Nabi Muhammad SAW. Dari segi kualitas perawinya, sunnah atau hadis ada yang bersambung mata rantainya, dan sunnah yang tidak bersambung mata rantai perawinya. Adapun sunnah yang bersambung dibagi menjadi tiga macam yakni pertama sunnah mutawatir. Sunnah mutawatir adalah sunnah yang diriwayatkan oleh rawi yang jumlahnya banyak dan diyakini tidak ada kebohongan.

<sup>43</sup>Umma Farida, Diskursus Sunnah Sebagai Sumber Hukum Islam: Perspektif Ushuliyyin dan Muhadditsin, *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*.

<sup>44</sup>Muhammad Mustafa Azami, *Hadis Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya*, Terjemah Ali Mustafa Yaqub, Cet. II (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000). Hlm. 30-32.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perawi yang jumlahnya banyak initerdiri dari generasi sahabat, tabi`in, dan tabi`ut Tabi`in. Jumhur ulama sepakat bahwa sunnah mutawatir adalah hujjah setelah Al-Qur`an. Kedua sunnah masyhur. Adalah sunnah yang diriwayatkan oleh dua orang atau lebih tetapi tidak mencapai derajat mutawatur, kemudian hadis ini tersebar pada generasi tabi`in dan tabiu` Tabi`in. Kedudukan hadis ini di bawah mutawatir. Ketiga sunnah ahad, yakni sunnah yang jumlah perawinya tidak sampai jumlah mutawatir baik perawi itu satu, dua, tiga, atau lebih tetapi tidak memberikan pengertian jika bilangan tersebut masuk ke dalam kategori jumlah mutawatir. Dalam menyikapi hadis ahad ini, Imam Abu Hanifah, Syafi`i, dan Ahmad ibn Hambal menerimanya dengan catatan perawinya shahih. Bahkan Imam Abu Hanifah memberikan syarat tambahan bahwa perawinya tidak mengamalkan yang bertetangan dengan matan hadis yang diriwayatkannya tersebut.<sup>45</sup>

*Ketiga, Ijmā`* adalah kesepakatan seluruh ulama mujtahid pada satu masa sesudah Rasulullah atas sebuah perkara agama. adapun *ijmā`* yang paling kredibel adalah *ijmā`* di zaman shahabat, tabiin, tabiut tabi`in, karena setelah itu para ulama berpencar dan jumlahnya banyak, dan makin banyaknya perselisihan sehingga sulit untuk bersepakat dalam satu perkara agama. syarat-syarat *ijma`* adalah: terjadinya kesepakatan, kesepakatan oleh seluruh ulama, terjadi setelah masa kenabian, dan berkaitan dengan perkara agama.<sup>46</sup> Pada prinsipnya *ijmā`* para ulama sepakat bahwa *ijmā`* dapat terjadi dengan

<sup>45</sup>Wet.if.unila. ac.id posted 11-05-2015 akses 22 Oktober 202017.02 wib.

<sup>46</sup>[www.muslim.or.id](http://www.muslim.or.id) akses 13 Mei 2018



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesepakatan para mujtahid dan adanya permasalahan yang tidak terdapat dalam nash, dan terjadi pada masa tertentu. Dengan demikian *ijmā`* dipandang tidak syah apabila ada yang tidak menyetujui, hanya ada seorang mujtahid, dan sudah jelas terdapat dalam nash. prinsipnya, *ijmā`* merupakan sumber hukum Islam ketiga setelah Al-Qur`an, Hadis. Eksistensinya dapat dijadikan hujjah bagi permasalahan yang tidak terdapat dalam nash atau terdapat dalam nash tetapi nash *dhanni*.<sup>47</sup>

Keempat, *Qiyās* yang berarti analogi (*reasoning*) yang diaplikasikan untuk memutus perkara hukum dengan merujuk kepada pada Al-Qur`an dan hadis (*sunnah*). metode ini berkembang setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW dan setelah ajaran Islam berkembang luas ke sejumlah negara. Salah satu penyebab metode ini muncul adalah perkembangan masalah sosial kemasyarakatan yang tentu saja belum terekam secara eksplisit dalam sumber Hukum Islam yang utama. Oleh karena itu diperlukan analogi.<sup>48</sup> Menurut Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, analogi dalam hal ini adalah mempersamakan cabang dengan pokok karena ada kesamaan *`illah* antara keduanya.<sup>49</sup> Secara teknis dalam menerapkan analogi harus diperhatikan empat (4) hal yakni pokok, cabang, hukum pokok, dan *`illah*. Contoh yang paling mudah dalam *qiyas* adalah haramnya jenis-jenis narkoba saat ini. Dalam Al-Qur`an hanya dikenal istilah *khamar*, karena sama-sama

<sup>47</sup>Zakaria Syafe`i, *Ijmā` Sebagai Sumber Hukum Islam: Kajian Tentang Kehujjahan Ijmā` dan Pengingkarannya*, *Jurnal Al-Qalam* No. 67/ XIII/ 1997.

<sup>48</sup>[www.britanica.com](http://www.britanica.com) akses 13 Mei 2018.

<sup>49</sup>Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Al-Ushul Min `Ilm Al-ushul*, Cet. I, (Iskandariyah: Dar al-Kutub Al-`Arabi, 2001), hlm. 53

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memabukkan, maka narkoba jenis apapun adalah haram dengan jalan analogi.

Di samping empat dalil yang disepakati oleh para ahli Hukum Islam sebagaimana tersebut di atas, ada sejumlah dalil-dalil Hukum Islam yang tidak disepakati. Jumlah dalil yang tidak disepakati sebenarnya cukup banyak, namun yang sering dibahas dalam kitab-kitab ushul hanya beberapa saja yakni: *al-istihsān*, *maslahah mursalah*, *al-urf*, *al-istishab*, *qaul Shahab*, *syar`u man qablana*, dan, *al-dzarī`ah*.<sup>50</sup>

*Kelima. Istihsān* Menurut Lisanul Arab sebagaimana dikutip Rahmat Syafe'i, secara bahasa berarti meminta berbuat kebaikan, yakni menghitung-hitung sesuatu dan menganggapnya kebaikan.<sup>51</sup> Secara istilah menurut Al-Hasan Al-Kurhi Al-Hanafī adalah perbuatan adil terhadap suatu permasalahan hukum dengan memandang hukum yang lain karena adanya suatu yang lebih kuat yang membutuhkan keadilan.<sup>52</sup> *Istihsān* ada dua macam yakni menguatkan *qiyās khāfi* atas *qiyās jāli* karena kuatnya pengaruh *qiyās khāfi* dan pengecualian oleh *juziyyah* dari kaidah umum (*kulliyah*) karena adanya alasan untuk mengecualikan. Contoh jenis pertama seperti misalnya yang masyhur dalam kitab-kitab fikih Hanafiyah bahwa wakaf tanah pertanian adalah termasuk juga hak lewat, hak minum, dan hak mengalirkan airnya, sebab tanpa ikut mengalirkan airnya sia-sia wakaf tersebut. Wakaf pertanian dianalogikan dengan jual beli karena keduanya sama-sama

<sup>50</sup> Abdur Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Cet. I (jakarta: Amzah, 2010), hlm. 196-197.

<sup>51</sup> Rahmat Syafei, *ilmu Ushul Fiqih*, Cet. III (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 111

<sup>52</sup> *Ibid.*, hlm. 112.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memiliki kesamaan yakni mengeluarkan hak milik tanah dari pemiliknya. Adapun contoh kedua adalah jual beli pesana (*salam*) yakni membeli sesuatu barang yang belum ada pada si penjual. Hal ini dikecualikan dari kaidah umum dari aturan jual beli yakni harus adanya barang ketika serah terima saat akad. Jual beli. Contohnya lagi adalah sisa minum burung buas seperti elang adalah suci. Menurut akal, sisa minum burung buas itu sama dengan sisa minum binatang buas, seperti singa, harimau dan serigala, adalah sama-sama tidak halal dimakan karena najis. Air liur yang keluar dari dagingnya adalah najis, tetapi dalam kasus ini burung buas minum itu menggunakan paraunya yang suci karena tidak mengeluarkan cairan baik darah maupun air liur seperti sisa minum manusia yang minum air dengan mulut yang suci. Atas dasar ini maka sisa minuman burung buas seperti elang adalah suci sebagaimana sisa manusia yang suci.<sup>53</sup>

*Keenam, Istishāb* Adalah apa yang telah ada di masa lalu, maka menurut hukum pokok dipandang masih ada hal itu di masa sekarang dan yang akan datang.<sup>54</sup> Secara prinsip secara terminologi berarti menetapkan berlakunya hukum sesuatu perkara yang telah ada pada masa lalu sampai sekarang dan masa mendatang sehingga ada dalil atau petunjuk yang merubah status hukum sesuatu perkara. Kehujjahan *istishāb* sebagai dalil hukum Islam adalah pertama, menetapkan hukum suatu perkara yang telah lalu adalah perkara fithrah yang sehat yang

<sup>53</sup>Syarmin Syukur, *Sumber-Sumber Hukum Islam*, Cet. I (Surabaya: Al-Ikhlas, 1993). Hlm. 174-176.

<sup>54</sup>Hasbi Ash-Shidqi, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, Cet. I, (Semarang:Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm. 356.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akan selalu berlaku bagi manusia. seperti misalnya menetapkan hidupnya seseorang yang telah hilang lama atau berpisah, karena memang belum ada kabar tentang kematiannya. Dalam kondisi seperti ini maka seseorang tersebut tetap dianggap masih hidup dan menerima apa yang memang menjadi hak-haknya sebagai manusia, seperti harta warisan. Kedua, ketetapan hukum syari'ah memperlihatkan bahwa Allah menetapkan hukum berdasarkan ketetapan hukum yang telah ada sehingga terjadi perubahan padanya, seperti keharaman khamar sehingga berubah menjadi cuka dan kehalalan perasan anggur sehingga berubah menjadi khamar. Ketiga, hadis Nabi Muhammad SAW yang menerangkan tentang *ru'yah* awal bulan Ramadhan adalah berakhirnya bulan Sya'ban, jadi apabila belum terlihat bulan baik secara *ru'yah* atau hisab astronomi maka masih tetap bulan Sya'ban. *Istishāb* ada dua macam: yakni pertama, hukum asal dari segala sesuatu adalah boleh. Kedua, *istishāb barā'ah ashliyah* yang artinya pada dasarnya segala sesuatu itu tidak ada hukumnya seperti lepasnya tuntutan seseorang dari syari'at sehingga ada dalil yang yang membebani. Dari *istishāb* ini lahirlah sejumlah kaidah seperti: pada asalnya segala sesuatu itu tetap hukumnya berdasarkan ketentuan yang telah ada sehingga ada dalil yang merubahnya, pada asalnya hukum segala sesuatu adalah boleh, pada asalnya manusia itu adalah bebas dari beban, dan keyakinan tidak bisa digugurkan oleh keragu-raguan.<sup>55</sup>

<sup>55</sup> Syarmin Sykur, *Sumber-Sumber.*, hlm. 230-240.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Ketuuah, Mashlahah mursalah.* Kata *Al-Mashālih* merupakan bentuk jama` dari *Mashlahah* yang berarti kepentingan, manfaat yang jika digunakan bersama dengan kata *mursalah* berarti kepentingan yang tidak terbatas, tidak terikat atau, kepentingan yang diputuskan secara bebas. Teori ini terikat pada konsep bahwa syari`ah ditujukan untuk kepentingan masyarakat, dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kemadharatan.<sup>56</sup> Dalil-dalil kehujjahan *mashlahah mursalah* adalah pertama, bahwa syari`at Islam ditegakkan atas dasar kemaslahatan umat manusia. Kedua, para sahabat telah sepakat berhujjah dengan *mashlahah mursalah*. Sedangkan syarat-syarat *mashlahah mursalah* adalah *mashlahah* itu harus hakikat bukan dugaan, bersifat umum menyeluruh, sejalan dengan tujuan-tujuan hukum Islam, dan bukan *mashlahah mulghah*. Adapun contoh-contoh *mashlahah mursalah* adalah sebagai berikut: pertama, kewajiban memungut harta benda seseorang apabila baitul mal kosong atau tidak mencukupi demi kemaslahatan umum, diterimanya kesaksian anak kecil terhadap temannya dalam satu kejadian dan tidak ada orang lain, terhalangnya istri yang dikawini oleh laki-laki sakit yang membawa kematiannya, dan mewarisi hartanya, yakni perkawinan yang bertujuan agar perempuan tersebut dapat mewarisi harta peninggalan, demikian menurut sebagian ulama. Mengendalikan harga barang dan pencatatan perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia.<sup>57</sup>

<sup>56</sup> Muhammad Muslehudin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis; Studi Perbandingan system Hukum Islam*, penerjemah, Yudian Wahyudi Asmin, Cet. I, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1991), hal. 127

<sup>57</sup> Syarmin Syukur, *Sumber-Sumber.*, hlm. 194-214.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Kedelapan, `Urf* atau adat istiadat. Secara bahasa, biasa dipersamakan artinya dengan adat. Secara definitif, para ulama mendefinisikan *`urf*, sebagaimana dijelaskan oleh Syaikh Abdul Wahhab Khalaf sebagai berikut:<sup>58</sup> kebiasaan yang telah berjalan dalam masyarakat baik perkataan, perbuatan, atau meninggalkan). *`urf* atau adat terdiri atas dua (2) macam; pertama *`Urf Shahih* (atau kebiasaan yang baik dan kedua, *`urf fasid* atau kebiasaan yang buruk. Adat yang baik adalah kebiasaan masyarakat yang tidak menyalahi dalil-dalil syariat tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal. Sedangkan sebaliknya.<sup>59</sup> Setidaknya ada tiga alasan yang mendasari *`urf* diterapkan sebagai sumber hukum Islam yakni: pertama, apa yang dipraktikkan di masa Nabi Muhammad SAW bahwa haji dan umrah umat Islam tetap melanjutkan apa yang dipraktikkan Bangsa Arab pra-Islam seperti *talbiyah*, *ihram*, *wukuf* dan lain-lain diteruskan oleh umat Islam kendati ritual thawaf dengan telanjang dihilangkan. Begitu juga *qishās* dan *diyāt* di mana keduanya adalah praktik budaya pra-Islam. kedua, setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, para sahabat juga mendasarkan hukum pada *`urf* masyarakat setempat. Pasca Islam tersebar di berbagai penjuru dunia, Islam sangat akomodatif terhadap budaya masyarakat setempat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Ketiga, geberasi tabi`in yang hidup pasca sahabat juga akomodatif terhadap budaya masyarakat setempat. Imam Hanafi menjadikan tradisi masyarakat

<sup>58</sup> Abdul Wahhab Khallaf., *`Ilm Ushul Fiqh*, hlm. 89.

<sup>59</sup> *Ibid.*, hlm. 89.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kufah sebagai rujukan dalam berfatwa. Abu Yusuf, salah satu tokoh senior pengikut Mazhab Hanafi berpendapat bahwa *`urf* atau adat istiadat yang berlaku di masyarakat menjadi pertimbangan dalam sistem pengambilan hukum ketika *nash sharîh* tidak diketemukan. Di Indonesi, metode *`urf* dipopulerkan oleh Hasbi Ash-Shiddiqy, pakar hukum Islam Indonesia yang juga guru besar fikih di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pada tahun 1940, Hasbi telah berani mencanangkan fikih Indonesia sebagai tindak lanjut fikih Hijaz, fikih Kufah, dan lain-lainnya.<sup>60</sup> Dalam konteks fikih Indonesia yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, terdapat sejumlah ketetapan fikih yang berlandaskan akomodasi terhadap adat istiadat Indonesia seperti misalnya harta gono gini dalam perkawinan, wasiyat wajibah bagi anak angkat dan orang tua angkat, ahli waris pengganti, masa berkabung bagi suami yang ditinggal mati oleh istrinya, dan masih banyak lagi contoh-contoh ketetapan yang merupakan akomodasi terhadap *`urf* atau adat kebiasaan.

Keembilan, Fatwa Shahabat. Menurut Jumhur Ulama, *qaul shahabat* menjadi hujjah jika tidak ada yang menentangnya. menurut Zaidiyah, hanya pendapat Ali sendiri yang dapat menjadi hujjah. Namun demikian menurut Zaidiyah, pendapat seorang sahabat yang masyhur dan diumumkan ke seluruh pelosok negeri serta tidak ada yang menyalahinya dipandang sebagai hujjah, karena ia salah satu dari martabat *ijma`*, sebaliknya pendapat sahabat yang tidak terkenal

<sup>60</sup>M. Noor Harisudin, *`Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara*, *Al-Fikr Volume 20 Nomor 1 Tahun 2016*.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkembang di masyarakat tidak dapat diterima sebagai sumber hukum Islam.<sup>61</sup> Alasan *qaul Shahab* sebagai hujjah dalam hukum Islam adalah karena para sahabat adalah generasi terdekat dengan Rasulullah SAW dibanding dengan generasi sesudahnya. Kedekatan dengan Nabi Muhammad SAW dapat dipastikan akan lebih memahami maksud-maksud syara` karena mereka adalah generasi yang menyaksikan langsung tempat dan waktu turunnya Al-Qur`an. Para ulama sepakat bahwa *qaul shahabati* yang dapat dipegangi hanyalah beberapa sahabat nabi saja diantaranya: pendapat Abu Bakar dan Umar, pendapat al-Khulafa al-Rasyidun, dan pendapat al-Khulafa al-rasyidun selain Ali sebagai hujjah. Pendapat ini adalah pendapat Imam Syafi`i, dan masih banyak ketentuan yang lain dari nukilan ini.

Di antara contoh-contoh *qaul Shahab* adalah sebagai berikut: fatwa Abu Bakar Ash-Shidiq saat memerangi pembangkang zakat, pengumpulan dan pencatatan Al-Qur`an, pendapat Umar tentang pembunuhan yang melibatkan lebih dari satu orang maka semua pelaku pembunuhan diberlakukan hukum *qishāsh*. Talak tiga yang dijatuhkan sekaligus, maka jatuhlah talak tiga, ini adalah fatwa Umar, saat kondisi paceklik, Umar tidak memberlakukan hukuman *qishāsh*, fatwa `Aisyah tentang batas maksiman kehamilan seorang wanita selama dua tahun, ia mengungkapkan bahwa anak tidak berada dalam perut ibunya lebih dari dua tahun, fatwa Anas bin Malik yang

<sup>61</sup> Hasbi Ash-Shiddiqi, *Pokok-Pokok*, hlm. 123.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menerangkan tentang masa minimal seorang waita haid adalah tiga hari.<sup>62</sup>

*Kesepuluh, Sad Dzari`ah.* Kata *Sad* berarti menutup, dan kata *Adz-dzari`ah* berarti *washilah* atau “jalan ke suatu tujuan”. Menurut Abdul Karim Zaidan sebagaimana dikutip oleh Satria Effendi *Sadd-Adz-Dzari`ah* adalah menutup jalan yang membawa kepada kebinasaan.<sup>63</sup> Senada dengan Abdul Karim Zaidan dan ulama-ulama yang lain, Hadi Jamil `Amir Umar dalam Disertasinya di Universitas An-Najah Al-Wathaniyyah memaparkan bahwa *Syadd Adz- Dzari`ah* adalah segala hal yang menjadi *wasilah* atau jalan atau pengantar kepada sesuatu yang lain.<sup>64</sup> Rukun *dzari`ah* dalam hal ini ada tiga yakni pertama, perkara yang tidak dilarang dengan sendirinya sebagai perkara *washilah*, sarana, atau jalan. Kedua, kuatnya tuduhan kepadanya, inilah yang menjadi penghubung antara *washilah* kepada perbuatan yang dilarang, dan ketiga kepada perbuatan yang dilarang. Para ulama mengatakan rukun yang ketiga ini sebagai perbuatan yang dilarang (*al-mamnú*), maka jika perbuatan tersebut tidak dilarang atau mubah maka *wasilah* atau *dzari`ah* tersebut tidak dilarang. Para ulama tidak bersepakat sepenuhnya dengan metode ini yakni *sad al-dzari`ah*. Ada tiga kelompok dalam masalah ini, pertama kelompok yang menerima sepenuhnya menerima sebagai metode dalam penetapan

<sup>62</sup> Abdul Hakim, Eksistensi Qaul Al-Shahabi Sebagai Dalil Syar`i, *MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan*, Volume 5, No 2, 2018.

<sup>63</sup> Satria Efendi dan M. Zen. *Ushul Fiqih*, Cet. IV, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012) hlm. 172

<sup>64</sup> Hadiy Jamil `Amir `Umar, *Ats-Tsabat wa At-Tathwir fi AT-Tasyri` al-Islami*, Cet I (Palestina: Jami`ah An-Najah Al-Wathaniyyah, 2002), hal. 199

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum. Termasuk kelompok ini adalah Mazhab Maliki, dan Hamabli. Adapun alasannya adalah firman Allah dalam QS. Al-An`am (6): 108. Para ulama kedua mazhab ini bahkan mengembangkan metode ini dalam pengembangan ilmu ushul fikih. Kedua, yang tidak menerima sepenuhnya sebagai metode penetapan hukum. Yang termasuk kelompok ini adalah Mazhab Hanafi dan Syafi`i. Kedua mazhab ini menerima metode ini dalam satu kasus namun menolak pada kasus lainnya. Ketiga ulama yang menolak metode ini sepenuhnya. Termasuk kelompok ini adalah seperti Ibnu Hazm yang mana beliau berpendapat bahwa metode ini adalah produk akal semata dan tidak berdasarkan pada nash-nash agama Islam. Contoh-contoh penggunaan metode ini adalah misalnya fatwa diharamkannya percobaan kloning terhadap manusia. fatwa ini dilandasi atas dasar bahwa manusia yang dimuliakan oleh agama dijadikan obyek percobaan yang dapat menimbulkan kemadharatan bagi kehidupan manusia. Apabila kloning diterapkan dan berhasil dapat dipastikan akan lahir manusia yang tidak memiliki kesempurnaan jiwa, dan pada sisi yang lain akan mengacaukan nasab seseorang yang dalam Islam nasab keturunan adalah dijunjung tinggi. Contoh lainnya adalah perkawinan beda agama. Para ulama kontemporer termasuk kesepakatan yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia adalah dilarang karena demi menjaga kemurnian akidah umat Islam.<sup>65</sup> contoh terkini terkait penggunaan metode ini adalah rumusan fikih shalat berjamaah,

<sup>65</sup>Hifdhotul Munawwarah, Sadd al-Dzar`ah dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqih Kontemporer, *Jurnal Ijtihad* Vol.12. No. 1, Juni 2018.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

shalat juma`at dan ibadah haji di masa pandemi covid 19. Tujuan ditutupnya sementara masjid-masjid dan ibadah haji dan umrah beberapa bulan yang lalu adalah pendekatan metode *sadd al-dzarî`ah* yakni menutup jalan kerusakan yang diakibatkan oleh kerumunan massa.

*Kesebelas, Syar`u man Qablana.* Secara bahasa, *syar`u man qablana* berarti syariat umat sebelum kita. Syaikh Abdul Wahhab Khalaf menguraikan bahwa ketika Al-Qur`an atau Sunnah Shahih mengisahkan hukum syari`at yang diberlakukan kepada umat sebelum Nabi Muhammad SAW dan diwajibkan kepada kita sebagaimana diwajibkan kepada umat sebelum kita, maka ulama sepakat bahwa hukum tersebut berlaku untuk kita juga. Seperti kewajiban puasa Ramadhan sebagaimana tertera dalam QS. Al-Baqarah (2): 183. Namun bila Al-Qur`an atau As-Sunnah Ash-Shahihah menukil hukum umat terdahulu, namun hukum tersebut telah dihapus dengan hukum yang diberlakukan kepada umat Nabi Muhammad SAW, maka ulama sepakat bahwa hukum tersebut tidak berlaku kepada kita. Seperti syari`at umat Nabi Musa AS, ketika mereka melakukan dosa besar maka sebagai penebus dosanya adalah membunuh diri mereka sendiri. Begitu juga ketika pakaian mereka terkena najis, cara mensucikannya adalah dengan memotong kain yang terkena najis.<sup>66</sup> Pengelompokan *syar`u man qablanā* ada tiga macam, pertama, syari`at terdahulu yang terdapat dalam Al-Qur`an dan penjelasan Nabi Muhammad SAW

<sup>66</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilm Ushul Fiqh*, hlm.93-94

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa telah dihapus dan tidak berlaku bagi umat Nabi Muhammad SAW. kedua, hukum dijelaskan dalam Al-Qur`an maupun hadis Nabi Muhammad SAW yang berlaku bagi umat sebelum kita dan dijelaskan juga berlaku untuk kita. ketiga, hukum-hukum yang disebutkan dalam Al-Qur`an atau hadis nabi dijelaskan berlaku untuk umat sebelum Nabi Muhammad SAW, namun secara jelas tidak dinyatakan berlaku untuk kita, juga tidak dijelaskan syariat tersebut dinasakh atau dihapus.

Secara prinsip para ulama berbeda pendapat tentang kehujjahan *syar`u man qablanā*. Pertama, jumhur ulama Hanafiyah dan Hanabilah serta sebagian Syafi`iyyah dan Malikiyah serta ulama-ulama kalam Asy`ariyah dan Mu`tazilah berpendapat bahwa hukum-hukum syara` sebelum kita dalam bentuk yang ketiga tersebut di atas tidak berlaku untuk umat Nabi Muhammad SAW. sebagian sahabat Hanafiyah, Malikiyah, dan sebagian sahabat Imam Syafi`i dan Imam Ahmad dalam salah satu riwayat berprinsip bahwa hukum-hukum yang disebutkan dalam Al-Qur`an atau hadis Nabi Muhammad SAW meskipun tidak diarahkan untuk umat Nabi Muhammad selama tidak ada penjelasan *naskah* atasnya, maka berlaku pula untuk umat Nabi Muhammad SAW.<sup>67</sup>

b. Metode Pembaruan Hukum Keluarga Kontemporer.

Metode pembaruan Hukum Islam konvensional yakni metode ijtihad yang pada umumnya dipergunakan sebagaimana telah dipaparkan mendapat kritikan dari para sarjana modern dalam Hukum

<sup>67</sup>Imam Yazid, Analisis Teori Syar`u Man Qablana, *Al Mashlahah Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam. kritikan ini muncul ke permukaan karena metode pembaruan hukum konvensional dinilai kurang bisa menjawab tantangan dan perubahan zaman. Di antara pengkritik metode pembaruan Hukum Islam konvensional adalah tokoh Neo-Modernisme Islam, Fazl al-Rahman. Ia menyimpulkan bahwa metode pembaruan konvensional yang selama ini dijadikan teori dalam menggali hukum memiliki tiga ciri khas karakteristik; *atomistic*, *a historis*, dan *literalistic*. Selama ini metode konvensional cenderung *atomistic* parsial atau *juz'i* yang dalam mengambil hukum para ahli Hukum Islam memahami beberapa ayat dan hadis terkait secara berdiri sendiri tanpa mengaitkan dengan nash lain yang relevan. Karakteristik berikutnya metode pembaruan konvensional adalah *a historis* yakni para ahli Hukum Islam kurang memberikan perhatian terhadap sejarah di sekitar teks wahyu turun, meskipun sudah ada *asbāb al-nuzul*.<sup>68</sup> Sebagai contoh ketika membahas polihami, dasar yang ditampilkan QS. Al-Nisā` (4): 3, sebagai pengecualian al-Syāfi'i mengaitkan al-Nisā` (4): 129, namun tidak satu pun empat mazhab yang mengaitkan dengan sejarah dan kondisi di sekitar teks wahyu saat itu. Karakteristik ketiga metode konvensional adalah *literalistik*. Menurut Rahman pembahasannya lebih cenderung menekankan pada aspek kebahasaan seperti *`ām* dan *khāsh*, *muthlāq* dan *muqayyad*, *qath'i* dan *dhanni*, *muhkām* dan *mutasyābih*, *amr* dan *nahy* dan seterusnya serta kehilangan konteks

<sup>68</sup>Penulis kurang sepakat dengan pendapat Rahman, dalam tatara praktik para ulama mempertimbangkan *asbābun nuzul*, *asbābul wurūd*, dan *urf* dalam menggali Hukum Islam.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nash dan seolah-olah gersang. Kritikan terhadap metode pembantuan konvensional juga disampaikan sarjana-sarjan lainnya seperti Hassan Hanafi, Amina Wadud, Abdullah Ahmed al-Na'im, Esposito dan lain-lainnya yang kurang lebih sama.<sup>69</sup>

Para sarjana kontemporer menawarkan teori-teori baru dalam menggali Hukum Islam kontemporer sebagai upaya menjawab tantangan dan kompleksitas permasalahan hukum yang muncul. Teori atau metode yang ditawarkan di antaranya; metode *double-movement* (gerak ganda) yang ditawarkan oleh Rahman. Gerak pertama menghendaki memahami makna al-Qur'an dan sunnah sesuai konteks kesejarahannya baik secara khusus di mana kejadian itu berlangsung maupun secara global bagaimana kondisi sekitar kejadian itu. gerak kedua dilakukan upaya untuk menerapkan prinsip dan nilai-nilai sistematis dan umum dalam konteks penafsiran pada era kontemporer. Dari sini nampak keberanian Rahman dari metode pembaruan konvensional yang lebih menekankan pada aspek kebahasaan. Metode berikutnya adalah metode *hudúd* (batas) yang ditawarkan oleh Syahrur. Menurutnya ada enam bentuk dalam teori batas. Pertama, ketentuan hukum yang memiliki batas bawah seperti perempuan-perempuan yang haram dinikahi. Kedua ketentuan batas atas seperti hukum potong tangan yang berlaku dalam kasus pencurian. Ketiga, ketentuan yang memiliki batas atas bawah seperti dalam waris dan poligami, keempat, ketentuan batas atas bawah berada dalam satu titik tidak boleh lebih

<sup>69</sup>Khoiruddin Nasution, Metode Pembaruan Hukum Keluarga Islam Kontemporer, *UNISIA*. Vol. XXX. No. 66 Desember 2007.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan kurang, seperti hukum cambuk 100 kali jilid bagi pezina. Kelima ketentuan yang memiliki batas atas bawah tetapi keduanya tidak boleh disentuh seperti pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Keenam, ketentuan yang memiliki batas atas bawah yang mana batas atas tidak boleh dilampaui dan batas bawahnya boleh dilampaui, seperti riba.<sup>70</sup> Metode atau teori selanjutnya adalah naskh terbalik atau naskh gaya baru. Sejatinya teori ini adalah teori gurunya yakni Mahmud Muhammad Thaha. Menurut kedua sarjana ini, *naskh* yang selama ini ayat-ayat Makiyyah sebagian dihapus oleh ayat-ayat Madaniyah, maka paradigma ini harus dibalik yakni Makiyah menghapus Madaniyah sehingga sesuai dengan Hak Asasi Manusi (HAM) yang disepakati oleh PBB.<sup>71</sup>

Metode-metode yang diwariskan oleh para sarjana Muslim sebagaimana telah dipaparkan di atas diberlakukan untuk semua persoalan kasus hukum yang muncul di era kontemporer dan tidak terfokus pada hukum keluarga saja. Adapun terkait hukum keluarga di Dunia Muslim Modern, Abdullah Ahmed An-Na'im melakukan kajian yang pada kesimpulannya ada beberapa teori atau metode dalam upaya pembaruan hukum keluarga;

Pertama, *takhshî al-Qadhâ`* (hak penguasa untuk memutuskan dan menguatkan keputusan pengadilan). Metode ini digunakan sebagai prosedur untuk membatasi penerapan syari'ah pada persoalan-persoalan hukum perdata bagi umat Islam. Seperti langkah untuk

<sup>70</sup>Jefry Tarantang, Teori dan Aplikasi., Jurnal Transformatif, Vol. 2. No. 1 April 2018

<sup>71</sup>*Ibid.*

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menghalangi pernikahan anak di bawah umur, hukum Mesir 1931 menolak bantuan matrimonial melalui pengadilan dengan menghalangi pengadilan dari memperbolehkan suatu klaim perkawinan jika seorang suami belum mencapai umur 18 tahun atau istri belum mencapai 16 tahun pada waktu proses pengadilan.<sup>72</sup>

Kedua, *takhayyur*. Metode ini menyeleksi berbagai pendapat yang terdapat dalam mazhab-mazhab dalam Islam, dan boleh memilih pendapat mazhab yang bukan termasuk arus utama. Sebagai contoh dalam kasus-kasus tertentu di Sudan membolehkan pengadilan mengambil pendapat selain Mazhab Hanafi, yang mana mazhab ini adalah resmi diterapkan oleh negara. Metode ini disebut juga dengan *talfiq*, yakni menggabungkan pendapat mazhab-mazhab dalam upaya memutuskan permasalahan hukum yang muncul. Dapat dicontohkan dalam kasus Mesir tahun 1925 yang mengatur dan membatasi kebebasan suami untuk menceraikan istrinya dengan memperlambat proses perceraian. Contoh lain adalah hukum Mesir mengesahkan surat wasiat tahun 1946 yang mengambil prinsip fiqh Syi'ah tanpa penjelasan mengapa langkah itu diambil.<sup>73</sup>

Ketiga, *re-interpretasi*. Proses ijtihad ini pernah digunakan untuk membatasi laki-laki melakukan poligami dan perceraian. Hukum Tunisia tahun 1956 menyatakan perceraian tidak syah kecuali dengan keputusan pengadilan dan pengadilan diizinkan mewajibkan suami membayar sejumlah uang apabila dalam sidang pemeriksaan

<sup>72</sup>Abdullah Ahmed An-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah*, alih bahasa Farid Wajdi, Cet I (Yogyakarta: LKiS, 1995), hlm. 89.

<sup>73</sup>*Ibid.*, hlm. 90.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disimpulkan suami telah berbuat tidak adil dalam perceraian. Re-interpretasi pernah juga dipraktikkan secara berlebihan oleh hukum Tunisia 1956 yang melarang secara mutlak laki-laki melakukan poligami karena sulit mewujudkan rasa keadilan kepada istri sebagaimana disyaratkan oleh nash Al-Qur`an.<sup>74</sup>

Keempat, *siyāsah syar`iyyah* (kebijaksanaan penguasa untuk menerapkan aturan-aturan administratif yang bermanfaat dan tidak bertentangan dengan syari`at). Metode ini diterapkan dalam Hukum Status Personal Syiria tahun 1953 yang menyatakan bahwa seorang istri yang tidak taat dan anaknya sudah berusia lima tahun, pengadilan dapat menempatkan mereka berdua di mana saja yang dianggap lebih aman, dan memberi kesejahteraan kepada anak. aturan ini berangkat dari prinsip umum Hukum Islam yang mengharuskan seorang istri untuk taat kepada suami, sang suami diizinkan untuk memaksa melaksanakan taat, pada waktu bersamaan syari`ah secara keras membatasi berbagai keadaan menyangkut perwalian seorang anak, kepada suami atau istri.<sup>75</sup>

Kelima, pembaruan melalui putusan pengadilan. Metode ini dipraktikkan di India dan bekas koloni Inggris lainnya. Sebagai misal Pengadilan Tinggi Lahore melakukan pembatasan secara jelas dalam *khurshid Jan v. Fazal dad*; “jika ada aturan Keputusan yang tidak jelas dalam Al-Qur`an dan Sunnah....maka Pengadilan dapat menggunakan penalaran perorangan dan karena itu, niscaya akan dituntun oleh nurani

<sup>74</sup>*Ibid.*

<sup>75</sup>*Ibid.*, 91.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang adil, sama dan baik”.<sup>76</sup> Dalam konteks ini pengadilan hanya sebatas menyatakan hak berbeda dari pandangan para ahli Hukum Islam yang sudah ada dan tidak untuk menolak penerapan syari`ah yang berlandaskan Al-Qur`an dan Sunnah Nabi. Dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa perbedaan antara metode konvensional dengan metode kontemporer adalah peran pemerintah. Metode kontemporer lebih didominasi oleh pemerintah dalam merealisasikan pilihan hukum.

Sarjana-sarjana kontemporer yang lain juga melakukan penelitian dalam bidang yang sama. Menurut Tahir Mahmood, metode pembaruan hukum keluarga di negara-negara mayoritas Muslim di samping menggunakan metode konvensional seperti *ijmā`*, *qiyās*, dan *ijtihad*, juga menerapkan metode pembaruan kontemporer yakni *takhayyur* dan *talfiq*. Senada dengan Tahir Mahmood, Esposito, seorang orientalis yang sangat konsen dengan kajian Hukum Islam menarik kesimpulan, bahwa metode pembaruan hukum keluarga di negara-negara Muslim khususnya di Mesir dan Pakistan, ia berkesimpulan ada tiga metode yakni *takhayyur*, *talfiq* dan *siyāsah syar`iyyah*. Khoiruddin Nasution menyimpulkan ada lima metode; *re-interpretasi*, *siyāsah syar`iyyah*, *mashlahah mursalah*, *takhayyur*, dan

<sup>76</sup>*Ibid.*

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*talfiq*. Ia sendiri menawarkan metode semi-tematik atau holistik dengan menyajikan semua nash terkait hukum keluarga.<sup>77</sup>

c. Metode *istishlāhî*

Ijtihad terbagi atas dua hal pertama ijtihad *muthlāq* dan ijtihad *juz`i*. Yang pertama adalah kemampuan ijtihad secara umum, artinya semua masalah dikaji dan dicari solusi status hukumnya, sedangkan yang kedua adalah kemampuan ijtihad hanya dalam sebagian kasus-kasus hukum saja. Metode *istishlāhî* bisa dipergunakan oleh para mujtahid dua muthlak maupun *juz`i*. Dalam khazanah ushul fikih ada tiga model penalaran dalam menggali hukum: metode *bayānî ta`lîlî*, dan *istishlāhî*.<sup>78</sup> Metode *bayānî* dalam konteks penemuan hukum Islam adalah metode penggalian hukum dengan mengedepankan teks-teks keagamaan yang termaktub dalam Al-Qur`an dan Sunnah dengan metode kebahasaan baik nahwu, sharaf, balaghah dan teknik kebahasaan lainnya. Metode *ta`lîlî* adalah metode penemuan hukum atas kasus-kasus baru dengan mencari motivasi atau kesamaan `illah dari nash agama kepada kasus yang muncul. Sedangkan *istishlāhî* upaya penemuan kemashlahatan yang menjadi tujuan hukum Islam. dari ketiga jenis model penalaran penemuan hukum Islam tersebut hanya dua yang terakhir yang memiliki prospektif lebih untuk dikembangkan yakni metode *ta`lîlî* dan *istishlāhî*.

<sup>77</sup>Ihab Habudin, Menimbang Metode Tematik-Holistik dalam Pembaruan Hukum Keluarga Muslim (telaah Pemikiran Khoiruddin Nasution), *Al-Ahwāl Vol. 8, No. 1, 2015 M/ 1436*

<sup>78</sup>Firman Muhammad Arif, Pengembangan Metode Ijtihad Istishlahi Dalam Maqāshid al-syarī`ah, *Jurnal Al-Ahkam STAIN Palopo: jurnal ilmu Hukum dan Syari`ah*, September 2014.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam tradisi ushul fikih, metode *istishlāhî* tampak pada metode *mashlahah mursalah* dengan mengedepankan *maqāshid al-syarî`ah* yang memepertimbangkan lima hal: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Tampak juga *istishlāhî* dipraktikkan dengan metode *sad al-dzarî`ah* yakni menutup jalan yang berpotensi menghartakan kepada kerusakan.<sup>79</sup> Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa metode ijtihad *istishlāhî* berorientasi mewujudkan kemashatana bagi kehidupan manusia sesuai dengan disyariatkannya hukum Islam.

#### 4. Masalah Lima (*al-masāil al-khams*)

Dalam tataran filosofis, kerangka dasar ini diterjemahkan melalui putusan tarjih Muhammadiyah yang ditanfidzkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah tahun 1955 yang dikenal dengan masalah lima (*al-masāil al-khams*). Masalah lima ini dikaji agak cukup lama dari tahun tiga puluhan dan baru putus tahun 1955. Lima pint masalah tersebut dikirim oleh Pimpinan Pusat Tarjih melalui Pimpinan Pusat Muhammadiyah kepada pengurus Muhammadiyah tingkat wilayah di seluruh Indonesia dan diteruskan kepada pengurus tarjih. Lima prinsip tersebut sangat penting untuk dibahas saat itu karena dalam praktik di masyarakat terjadi tumpang tindih antara agama dan tradisi yang mana tradisi acap kali diposisikan sebagai ajaran agama. sehingga tidak aneh KH Ahmad Dahlan dicap sebagai kyai kafir hanya gara-gara mengajarkan ilmu-ilmu umum yang dianggap dunia dan sering memakai pakaian model Barat. Maka

<sup>79</sup>*Ibid.*



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam lima masalah ini secara jelas didukkan mana yang disebut agama dan mana yang disebut dunia. Sebagai contoh lagi yang dapat dikemukakan pada penjelasan ini adalah pemahanan masyarakat Islam di Indonesia saat itu tentang makna *sabilillah*. Dalam istilah ini acap kali diinentikkan semata-mata hanya berperang melawan penjajah saja, sedangkan amaliah-amaliah yang lain seperti memajukan pendidikan rakyat yang nota bene masih ketinggal jauh dari Barat dianggap bukan masuk ranah *sabilillah*. Secara prinsip amaliah seprti memajukan pendidikan yang telah dirintis oleh Muhammadiyah sejak berdirinya adalah bagian dari implementasi makna *sabilillah*. Terakhir terkait dengan metode *qiyās*. Klausul ini ditegaskan dalam rencana muktamar tarjih saat karena tuntutan keadaan, yang mana kemajuan dan kompleksitas kehidupan masyarakat yang secara otomatis persoalan hukum keagamaan semakin meluas sehingga perlu didudukkan metode ini dalam muktamar tarjih agar mampu menjawab tantangan zaman. Begitu juga makna ibadah yang dalam praktik di masyarakat saat itu dipahami hanya sebatas ritual semata, maka juga perlu didudukkan masalah ibadah dalam muktamar tarjih saat itu.

Lima dasar dimaksud adalah: pertama, agama (*al-dîn*). Agama dalam pandangan Muhammadiyah adalah :

Agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad ialah apa yang diturunkan di dalam al-Qur`an dan yang tersebut dalam dalam Sunnah yang shahih, berupa perintah-perintah dan larangan-larangan serta petunjuk untuk kebaikan manusia di dunia dan akhirat.<sup>80</sup>

<sup>80</sup>Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Himpunan Puusan Tarjih Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2009), hlm. 277.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kedua, dunia (*al-dunyā*) yang memiliki makna segala perkara yang tidak menjadi tugas diutusnya Rasul atau urusan yang sepenuhnya diserahkan kepada kebijaksanaan manusia.<sup>81</sup> ketiga, ibadah (*al-`ibādah*). Adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan jalan mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Dalam hal ini ada dua yakni segala yang diizinkan Allah dan yang khusus telah ditetapkan *kaifiyat*-nya oleh syariat.<sup>82</sup> Keempat, sabilillah. Adalah segala yang menyampaikan kepada keridhaan Allah, dan kelima, *qiyās*. Tentang *qiyas* ini, Majelis Tarjih saat itu merumuskan sebagai berikut :

Bahwa dasar mutlak untuk berhukum dalam agama Islam adalah al-Qur`an dan al-Hadis. Bahwa di mana di mana perlu dalam menghadapi soal-soal yang telah terjadi dan sangat dihayatkan untuk diamalkannya mengenai hal-hal yang tak bersangkutan dengan ibadah mahdhah padahal untuk alasan atasnya tiada terdapat nash sharih di dalam al-Qur`an dan Sunnah Shahihah, maka dipergunakanlah alasan dengan jalan ijtihad dan istinbath daripada nash-nash yang melalui persamaan `illah, sebagaimana telah dilakukan oleh ulama-ulama salaf dan khalaf.<sup>83</sup>

Melihat teks putusan tarjih tentang qiyas di atas terlihat bahwa majelis tarjih sangat berhati-hati dalam menggunakan qiyas. Hal ini tampak pada kalimat ‘sangat dihayatkan’ pada putusan di atas. selanjutnya rambu-rambu berikutnya adalah qiyas tidak boleh untuk berijtihad dalam masalah ibadah mahdhah.

5. Kerangka dasar pemikiran Muhammadiyah tentang keluarga sakinah.

Sebagai organisasi Islam, Muhammadiyah memberikan garis-garis besar tuntunan bagi warganya dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Tidak kalah pentingya dalam memberikan bimbingan ini adalah tuntunan

<sup>81</sup> *Ibid.*

<sup>82</sup> *Ibid.*, hlm. 278.

<sup>83</sup> *Ibid.*

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keluarga sakinah. Keluarga adalah unsur terkecil dalam sebuah negara, karena itu, dalam upaya mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya ini, Muhammadiyah memiliki rumusan-rumusan penting terkait prinsip-prinsip keluarga sakinah. Prinsip-prinsip tersebut adalah :

Pertama, keluarga adalah tiang utama kehidupan umat dan bangsa sebagai tempat sosialisasi nilai-nilai yang paling intensif dan menentukan, karena itu setiap warga Muhammadiyah berkewajiban mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Kedua, keluarga-keluarga di lingkungan Muhammadiyah dituntut mewujudkan keluarga sakinah terkait dengan pembentkan Gerakan Jama'ah dan Dakwah Jama'ah (GJJD) sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Ketiga, keluarga-keluarga di lingkungan Muhammadiyah di samping merelisasikan nilai-nilai keislaman juga berfungsi sebagai pembinaan kader-kader dakwah Muhammadiyah. Keempat, keluarga-keluarga di lingkungan Muhammadiyah dituntut menjadi teladan, saling menghormati, menyayangi, musyawarah dan lain-lainnya. Kelima, keluarga-keluarga di lingkungan Muhammadiyah wajib menyikapi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai sarana pendidikan dalam keluarga sehingga terhindar dari efek negatif media, keenam, keluarga-keluarga di lingkungan Muhammadiyah harus memiliki kepedulian sosial yang ihsan dan ma'ruf sehingga terbentuk masyarakat *qaryah thayyibah*. Ketujuh, pelaksanaan shalat harus menjadi prioritas keluarga.<sup>84</sup>

Ringkasan dari rumusan-rumusan keluarga sakinah sebagaimana dipaparkan di atas menunjukkan bahwa keluarga memiliki peran

<sup>84</sup> Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Pedoman Hidup Islami.*, hlm. 67-68.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

signifikan dalam ranah domestik, puubli, dunia dan akhirat. Keluarga bukan semata-mata mengurus kehidupan internal antara anggota keluarga tetapi lebih dari itu keluarga memiliki peran strategis untuk mewujudkan masyarakat *qaryah thayyibah*, kaderisasi pergerakan, kaderisasi kepemimpinan bangsa serta kebahagiaan kehidupan dunia dan akhirat. Atas dasar inilah, dalam pandangan Muhammadiyah, keluarga memiliki peran yang sangat luas. Dalam rangka untuk mewujudkan cita-cita ideal tersebut perlu dipeuhinya hak dan kewajiban antar anggota keluarga sebagai berikut:

Pertama, Kewajiban bersama suami istri dalam keluarga. Suami istri harus saling setia, saling menghargai, saling menghormati kedua keluarga, suami istri saling jujur, setiap persengketaan harus disikapi secara bijak, dan tidak saling mencari kesalahan. Kedua, hak bersama suami istri. Dalam hal ini suami istri halal bergaul, terjadi hubungan mahram karena semenda, saling mewarisi, dan anak yang lahir bernasab kepada ayah kandung. Ketiga, kewajiban suami. Suami berkewajiban memberi nafkah, menjaga kehormatan istri, menjadi mitra istri dalam keluarga, mendukung pengembangan potensi istri, demokratis, dan menghindari kekerasan. Keempat, keajiban istri. Istri berkewajiban mentaati suami, menghormti suami, menjaga nafkah suami, mengingatkan suami apabila salah dengan bijaksana, dan memberikan semangat kepada suami. Di samping hak kewajiban suami istri juga berlaku hak dan



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kewajiban antara orang tua terhadap anak dan begitu pula sebaliknya.<sup>85</sup>

Dari penjelasan hak kewajiban suami istri serta orang tua dan anak tersebut menggambarkan secara utuh konsep keluarga sakinah dalam pandangan Muhammadiyah. Keluarga terdiri atas unsur-unsur saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Keluarga tidak hanya berhenti pada suami, istri, dan anak, tetapi juga berhubungan dengan kedua keluarga suami dan istri.

#### 6. Manhaj Tarjih Muhammadiyah.

Muhammadiyah sebagai organisasi Islam memiliki kerangka dasar pemikiran dalam beragama. Muhammadiyah sendiri mendefinisikan dirinya sebagai Gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi munkar dan tajdid, bersumber kepada al-Qur'an dan As-Sunnah serta berasaskan Islam.<sup>86</sup> Dalam tataran praktis, kerangka dasar pemikiran Muhammadiyah ini lazim disebut dengan ideologi gerakan Muhammadiyah. Secara prinsip ideologi Muhammadiyah dirintis oleh KH. Ahmad Dahlan sebagai pendiri persyarikatan yang disampaikan kepada murid-muridnya, dan kemudian secara turun-temurun diteruskan oleh para tokoh Muhammadiyah sesudahnya. Warisan ideologi KH. Ahmad Dahlan dirumuskan oleh organisasi dan tentu saja dilengkapi oleh para tokoh Muhammadiyah sesuai dengan zamannya dalam dokumen resmi yang dilegalisasi melalui kongres maupun dokumen resmi persyarikatan lainnya. Kerangka dasar pemikiran Muhammadiyah ini tercantum dalam mukaddimah anggaran dasar Muhammadiyah, kepribadian Muhammadiyah, matan keyakinan

<sup>85</sup>Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah 3*, Cet. I (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2018), hlm. 399-402.

<sup>86</sup> Anggaran Dasar Muhammadiyah, pasal 4 ayat 1 dan 2.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

cita-cita hidup Muhammadiyah (MKCH), pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah (PHIWMP, dan masalah lima (*al-masā'il al-khams*). Khittah organisasi Muhammadiyah yang termaktub dalam dokumen-dokumen tersebut secara praktis diejawantahkan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid sebagai lokomotif organisasi atau ruh persyarikatan. Majelis Tarjih dan Tajdid menerjemahkan pokok pikiran pergerakan Muhammadiyah melalui perangkat metode praktis dalam ijtihad keagamaan yang lebih dikenal dengan manhaj tarjih.

Secara prinsip Muhammadiyah tidak berafiliasi dengan mazhab-mazhab dalam Islam, akan tetapi pemikiran mazhab menjadi rujukan dan peryimbangan dalam mengambil keputusan fatwa keagamaan. Dengan demikian patut kiranya prinsip-prinsip ijtihad mazhab-mazhab dalam Hukum Islam ditampilkan dalam bagian ini sebagai cerminan bahwa Muhammadiyah memiliki mata rantai kesejarahan pemikiran dengan khazanah pemikiran Hukum Islam di antara mazhab-mazhab yang perlu dipaparkan pada bagian ini adalah sebagai berikut:

Para imam mazhab telah membangun mazhab yang mencakup produk fikih sekaligus ushul fikih. Masing-masing memiliki jalan teknik ijtihad yang mandiri. Secara singkat dapat dipaparkan jalan ijtihad mazhab-mazhab sebagai berikut :

Pertama, Mazhab Hanafi. Dalam berijtihad, Mazhab Hanafi bersumber kepada Al-Qur'an, Hadis, fatwa-fatwa Shahabat, *ijma`*, *qiyas*,

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*istihsan*, dan *urf*.<sup>87</sup> Al-Qur`an adalah sumber dari segala hukum dalam ajaran agama Islam yang merupakan kumpulan hukum syari`ah. Menurut Abu Hanifah, penjelasan Al-Qur`an adalah *kulli* dan terkadang *tabyîn*, karena itu untuk memahami hukum Islam mesti memerlukan sunnah atau hadis Nabi Muhammad SAW. Abu Hanifah berpendapat bahwa sunnah adalah penjelas al-Qur`an, karenanya *bayân* Al-Qur`an ada tiga macam yakni *bayân taqrîr*, *tafsîr*, dan *tabdîl*. Sunnah sebagai sumber hukum Islam menurut Abu Hanifah martabatnya di bawah Al-Qur`an kecuali sunnah *mutawatir*. Abu Hanifah juga menggunakan fatwa sahabat, apabila satu masalah ditemukan fatwa sahabat, maka berhujjah dengannya, jika terdapat beberapa pendapat dalam satu masalah, maka mengambil salah satunya, dan jika tidak ada, maka berijtihad. Abu Hanifah mengakui *ijmâ` qaulî* dan *sukutî*. Diriwayatkan bahwa Abu Hanifah mengambil hukum yang telah disepakati oleh ulama Kufah, demikian juga apabila seluruh ulama menyepakati satu masalah maka ia mengambilnya sebagai hujjah. Ketika tidak menemukan nash atas satu masalah, tidak pula ditemukan fatwa sahabat, maka Abu Hanifah berijtihad dengan *qiyâs*, kadang-kadang *istihsân*, dan *masalah mursalah*.<sup>88</sup>

Kedua, Mazhab Maliki Langkah-langkah dalam berijtihad merujuk kepada Al-Qur`an, Hadis, *ijma`*, *qiyas*, amalan penduduk Madinah, *istihsan*, *sad dzari`ah*, *mashlah mursalah*, *fatwa shahabat*, *istishhab*, dan

<sup>87</sup>Dedi Supriyadi, *Perbandingan Mazhab Dengan Pendekatan Baru*, Cet. I, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm.

<sup>88</sup>Hasbi Ash-Shiddiqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, Cet. I (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm. 150-171.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*syar`u man qablana*.<sup>89</sup> Imam Malik menggunakan amalan ahli Madinah sebagai hujjah dan sandaran Hukum Islam. Teori ini bukan hanya dipegangi oleh Imam Malik, tetapi juga gurunya yakni Rabi`ah. Ia mengatakan bahwa seribu orang mengambil dari seribu orang lebih baik dari seorang mengambil dari seorang. Imam Malik mengatakan bahwa apa yang disepakati oleh ulama Madinah tidak boleh ditentang. Perlu dijelaskan di sini bahwa kesepakatan ulama Madinah dalam masalah yang diistinbath-kan, ada tiga riwayat; pertama, ia tidak memandangnya sebagai hujjah, kedua tidak memandang sebagai hujjah tetapi dapat dijadikan penguat, dan ketiga, memandangnya sebagai hujjah oleh sebagian ulama Malikiyah. Kesimpulannya, amalan ahli Madinah yang bersandikan pada dalil-dalil nash yang lebih kuat didahulukan daripada dalil yang diambil dari hadis yang berkualitas ahad.<sup>90</sup>

Ketiga, Mazhab Syafi`i. Dalam berijtihad merujuk kepada Al-Qur`an, Hadis, *ijma`*, dan *qiyas*. Sedangkan yang lain sekedar pendukung.<sup>91</sup> Imam Mujtahid yang mula-mula merumuskan batasan-batasan *qiyās* adalah Imam Asy-Syafi`i. Para ulama sebelumnya membahas tentang *ra`yu* tanpa ada batasan-batasan yang jelas dan dasar-dasar penggunaannya dalam berdalil untuk menemukan Hukum Islam dalam satu masalah. Imam Asy-Syafi`i tidak mendefinisikan teori ini, tetapi menjelaskan secara detail, contoh-contoh, syarat-syarat, hakikat,

<sup>89</sup> Dedi Supriyadi, *Perbandingan Mazhab*, hlm. 169.

<sup>90</sup> Hasbi Ash-Shiddiqy, *Pokok-Pokok*, hlm. 212-214.

<sup>91</sup> Dedi Supriyadi, *Perbandingan Mazhab*, hlm. 175



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menunjukkan bahwa ia telah membuat kaidah-kaidah penalaran yang benar sesuai dengan kaidah syari'at.<sup>92</sup>

Keempat. Mazhab Hambali Mazhab Hambali memegangi Al-Qur'an, Hadis, *ijma'*, *qiyas*, *istihsan*, *sad dzaari'ah*, dan *mashlahah mursalah*.<sup>93</sup> Imam Ahmad dalam berdalil mengamalkan hadis lemah dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh para ulama hadis yakni di antaranya perawinya bukan seorang pendusta. Menurut Ibnu Taimiyah, Imam Ahmad Menagambil hadis lemah yang dapat dinaikkan derajatnya kepada hadis hasan atau baik. Dapat disimpulkan bahwa Imam Ahmad mendahulukan hadis lemah daripada pendapat yang berdasarkan penalaran, dan langkah ini lebih hati-hati. Ia mendasarkan pada akal hanya dalam keadaan darurat saja.<sup>94</sup>

Manhaj Tarjih adalah seperangkat metode teknis dalam proses ijtihad baik dalam bidang akidah, ibadah, muamalah, dan sosial kemasyarakatan. Frasa manhaj tarjih secara bahasa berarti cara melakukan tarjih. Sebagai sebuah istilah, manhaj tarjih lebih dari sekedar cara bertarjih. Menurut Syamsul Anwar, istilah tarjih adalah berasal dari disiplin ilmu usul fiqh. Dalam disiplin ilmu ini, tarjih bermakna melakukan penilaian terhadap dalil-dalil yang secara dhahir tampak bertentangan atau evaluasi terhadap pendapat-pendapat ulama untuk menentukan mana yang lebih unggul.<sup>95</sup> Akan tetapi di lingkungan Muhammadiyah, tarjih telah mengalami perkembangan makna yakni

<sup>92</sup>Hasbi Ash-Shiddiqy, *Pokok-Pokok*, hlm. 256.

<sup>93</sup>Dedi Supriyadi, *Perbandingan Mazhab*, hlm. 185

<sup>94</sup>Hasbi Ash-Shiddiqy, *Pokok-Pokok*, hlm., 288

<sup>95</sup> Syamsul Anwar, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Panitia Musyawarah Nasional Tarjih Muhammadiyah XXX), hlm. 3

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

proses ijtihad itu sendiri.<sup>96</sup> Manhaj tarjih dalam pemaknaannya lebih kepada teknik atau cara dalam berijtihad.

Secara prinsip, manhaj tarjih adalah sebagai berikut: *pertama*, dalam berijtihad dasar utamanya adalah al-Qur`an dan As-Sunnah. Ijtihad dengan metode yang telah disebutkan pada poin sebelumnya pada prinsipnya Muhammadiyah menerimanya. *Kedua*, prinsip musyawarah, ketiga, tidak mengikatkan diri pada mazhab, tetapi pendapat mazhab dijadikan sebagai acuan dalam ijtihad. *Keempat*, terbuka dan toleran, artinya tidak beranggapan fatwa tarjih yang paling benar, *kelima*, dalam masalah akidah hanya menggunakan dalil-dalil mutawatir. Akan tetapi prinsip ini sudah di-*nasakh* pada munas tarjih ke-27 di Malang. *Keenam*, menerima ijma` shahabat, *ketujuh*, terhadap dalil-dalil yang bertentangan ditempuh jalur kompromi, apabila tidak bisa ditempuh jalan tarjih. *Kedelapan*, menggunakan *al-dzari`ah*, kesembilan, *ta`lil al-ahkām* dapat digunakan sepanjang sesuai dengan maksud syariah. *Kesepuluh*, menggunakan dalil secara utuh, *kesebelas*, hadis ahad dapat mentakhsis terhadap keumuman al-Qur`an sepanjang bukan masalah akidah, *kedua belas*, prinsip kemudahan, *ketiga belas*, mendahulukan nash daripada akal memiliki kelenturan, *keempat belas*, dalam masalah dunia peran akal sangat dibutuhkan, *kelima belas*, dalam memahami nash musytarak dapat dengan pendapat sahabat, *keenam belas*, dalam masalah akidah, makna dhahir didahulukan.<sup>97</sup>

<sup>96</sup> *Ibid.*, hlm. 5.

<sup>97</sup> Asymuni Abdurrahman, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah: Metodologi dan Aplikasi*, Cet. IV (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 12-14.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 7. Pendekatan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dalam ijtihad Hukum Islam (*bayānî, burhānî, `irfānî*)

Pengetahuan pada umumnya bersumber kepada tiga hal yakni teks agama, akal, dan wahyu. Sejatimya tiga sumber ilmu pengetahuan ini tidak bisa dipisahkan dan antara ketiganya saling melengkapi. Hanya saja dalam sejarah peradaban umat manusia ketiga sumber tersebut tidak secara mulus beriringan. Sumber ilmu pengetahuan dalam istilah filsafat disebut dengan epistemologi yang artinya cabang ilmu filsafat tentang dasar-dasar dan batas-batas pengetahuan.<sup>98</sup> Menurut Harold H. Titus, dkk sebagaimana dikutip oleh Amin Abdullah, epistemologi adalah cabang filsafat yang secara khusus membahas teori ilmu pengetahuan. Secara bahasa berasal dari bahas Yunani, *episteme* yang berarti pengetahuan. Secara garis besar ada dua arus besar epistemologi yakni idealisme yang lebih menekankan pada aspek akal pikiran manusia dan realisme yang terfokus pada realitas empirik yang ada di sekitar manusia.<sup>99</sup>

Dalam tradisi Islam dikenal tiga arus besar epistemologi yang berkembang yakni epistemologi *bayānî, burhānî, dan `irfānî*. Yang pertama ilmu pengetahuan yang bersumber pada teks-teks wahyu yakni Al-Qur`an dan hadis, yang kedua bersumber pada ilmu pengetahuan, dan ketiga bersumber pada pengalaman intuitif atau pengalaman *kasyfî*. Dalam perjalanannya ketiga aspek epistemologi tersebut mengalami nasib yang berbeda-beda. Dalam fakta sejarah perkembangan ilmu pengetahuan *bayānî dan `irfānî* yang lebih menonjol, sedangkan *burhānî* mengalami

<sup>98</sup> <https://kiwi.web.id/epistemologi.html>. akses 3 Januari 2021 jam 22. 58 wib.

<sup>99</sup> Amin Abdullah, Aspek Epistemologis Filsafat Islam, dalam Irma Fatimah (ed), *Filsafat Islam, Kajian Ontologis, Epistemologis, Aksiologis, Historis, Prospektif*, Cet I (Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam LESFI), 1992), hlm. 28.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketertinggalan, kecuali pada zaman keemasan Islam saat Daulah Umayyah dan Abbasiyah mencapai puncak kegemilangan.

Istilah *bayānî*, *burhānî*, dan *`irfānî* pertama kalinya diperkenalkan oleh Al-Jabiri ketika ia membedah pemikiran Arab dalam karya-karyanya yang bertujuan untuk meneghidupkan kembali peradaban Arab yang tentu saja sangat berkait kelindan dengan pemikiran Islam pada umumnya. Epistemologi *bayānî*, menurut Al-Jabiri, adalah corak pemikiran yang paling awal muncul dalam khazanah pemikiran Arab. Menurutnya, secara klasikal-etimologis, *term bayānî* memiliki beragam makna yang di antaranya kesinambungan (*al-washl*), keterpilahan (*al-fashl*), jelas dan terang (*al-zhuhur wa al-wudhuh*), dan kemampuan membuat terang dan jelas. Epistemologi memiliki akar sejarah yang panjang yang mana secara faktual historis Bangsa Arab sangat mengagungkan nilai-nilai kebahasaan baik sastra maupun *balaghah*. Dengan demikian secara singkat dapat disimpulkan bahwa metode *bayānî* bersumber kepada Al-Qur`an dan hadis.<sup>100</sup> Kronologi *bayānî* setidaknya telah dimulai sejak Nabi Muhammad SAW yang dalam faktanya beliau sering menjelaskan ayat-ayat yang sulit dipahami oleh para sahabat. Proses selanjutnya para sahabat menafsirkan Al-Qur`an dari ketetapan yang mereka peroleh langsung dari Nabi Muhammad SAW, dan seterusnya demikian kepada kalangan Tabi`in, dan berlanjut dari generasi ke generasi hingga kini.<sup>101</sup>

Secara teknis, pendekatan *bayānî* dalam pemikiran Islam

<sup>100</sup>Wira Hadi Kusuma, Epistemologi Bayānî, `Irfānî, dan Burhānî Al-Jabiri dan Relevansinya Bagi Studi Agama Untuk Resolusi Konflik dan Peacebuilding, Syi`ar Vol. 18 No.1 Januari –Juni 2018

<sup>101</sup>Muhammad Hasyim, Epistemologi Islam: Bayānî, Burhānî, dan `Irfānî), *Al-Murabbi: Jurnal Pendidikan Islam* Program studi Pendidikan Agama Islam Universitas Yudharta Pasuruan, Vol. 3 Nomor 2, Juni 2018.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terimplementasikan dalam bidang kajian ushul fikih, tafsir, hadis, `ulumul Qur`an, `ulumul hadis, nahwu, sharaf, balaghah, kaidah-kaidah fikih, dan masih sederet cabang-cabang ilmu yang berkaitan dengan nash Al-Qur`an dan hadis. Secara nyata selama ini epistemologi *bayānî* telah dipergunakan oleh para ahli fikih dan ahli teolog untuk memahami dan menganalisa tek keagamaan guna menemukan makna yang dikehendakioleh lafaz pada satu sisi dan untuk *istinbāth* hukum dari nash Al-Qur`an dan hadis pada sisi yang lain.<sup>102</sup> Metode *bayānî* merupakan penggabungan metode fikih yang dikembangkan oleh Al-Syāfi`i dengan metode retorika Al-Jahiz yang pada tataran realitas tradisi sangat mendominasi bidang fikih dan kalam. Metode ini menurut Amin Abdullah sebagaimana dipaparkan oleh Wira Hadi Kusuma memiliki kelemahan dalam ranah *Islamic Studies* manakala tradisi berpikir tekstual ini berhadapan dengan penganut agama yang berbeda serta kultur sosial yang beragam.<sup>103</sup>

Episremologi *burhānî* secara leksikal memiliki arti argumen yang jelas dan tegas. Selanjutnya kata ini disadur dalam terminologi ilmu manthiq untuk menunjukkan arti proses penalaran yang menetapkan benar tidaknya antar proposisi melalui cara deduksi. Metode *burhānî* sangat berbeda dengan *bayaānî* dan *`irfānî* yang masih terikat dengan kesucian,. Metode *burhānî* menyandarkan diri pada kekuatan akal rasio yang dilakukan melalui dalil-dalil logika. Bahkan dalil-dalil agama hanya bisa

<sup>102</sup> *Ibid.*<sup>103</sup> Wira Hadi Kusuma, Epistemologi Bayānî., dalam *Syir`ah Vol. 18 No.1 Januari-Juni*

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diterima sepanjang bisa diterima oleh akal pikiran.<sup>104</sup> Tradisi berpikir ini dalam khazanah filsafat Yunani dikembangkan oleh Aristoteles yang dalam bahasa Arab ditulis Aristha dengan logika manthik yang meliputi persoalan alam, manusia dan Tuhan. Begitu juga diskursus filsafat dewasa ini yang melihat alam, Tuhan dan manusia bukan lagi dari sisi metafisik sebagaimana metode *bayānî* dan *`irfānî*.<sup>105</sup>

Epistemologi berikutnya adalah *`Irfānî* yang secara bahasa berasal dari *`arafa* semakna dengan makrifat yang terjemahannya adalah pengetahuan. Pengetahuan *`irfānî* berbeda dengan ilmu pengetahuan karena metode ini lebih mengedepankan *direct experiential* atau pengalaman *kasyfî* seorang hamba dengan Tuhan. Secara terminologi *`irfānî* memiliki makna pengungkapan pengetahuan yang diperoleh melalui olah kesucian jiwa seorang hamba dalam rangka mencapai kesempurnaan jiwa yang pada tataran puncaknya Tuhan memberikan penyinaran kejiwaan kepada sang hamba (*kasyfî*).<sup>106</sup> Menurut Simuh, pengalaman kejiwaan seseorang dalam tradisi tasawuf diperoleh dengan tujuh jalan *maqāmāt* yakni taubat, wara`, zuhud, faqir, sabar, tawakkal, dan ridha. Melalui tujuh tangga inilah kemudian seorang hamba menunggu anugerah *kasyfî* dari Tuhan. Dalam hal ini seorang hamba tidak bisa memaksakan diri memperoleh pengalaman puncak *kasyfî* atau setidaknya pengalaman seseorang pasti berbeda dengan orang lain, karena memang pengalaman puncak *kasyfî*

<sup>104</sup> *Ibid.*

<sup>105</sup> Mochamad Hasyim, Epistemologi Islam., dalam *Al-Murabbi Jurnal Pendidikan Islam* Vol. 1, Nomor 2, Juni 2018.

<sup>106</sup> Wira Hadi Kusuma, Epistemologi Bayānî., dalam *Syi'ar* Vol. 18 No.1 Januari-Juni 2018.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah ototaspenuh kehendak Tuhan.<sup>107</sup> Dalam pandangan Sayyed Hossein Nasr, pengetahuan kesucian ini diyakini akan membawa perubahan besar dalam kehidupan umat manusia dalam rangka membebaskan manusia dari kungkungan dan penjara jiwa. Pengetahuan ini tidak lain dan bukan adalah pengetahuan tidak terbatas dan abadi.<sup>108</sup> Terkait dari manakah pengetahuan `irfānî, para ahli filsafat beragam pendapat; bahkan ada yang berpendapat bahwa metode ini berasal dari semua agama dan keyakinan. Asumsi ini bukan tanpa dasar, seperti misalnya Sayyed Hossein Nasr dalam karyanya menyebut ajaran Moksa dalam Hinduisme.<sup>109</sup>

Muhammadiyah mengakomodasi ketiga metode berpikir sebagaimana telah dipaparkan di atas, tentu saja tidak diterjemahkan secara persis dengan ketiga tradisi tersebut terutama dalam tradisi berpikir `irfānî.<sup>110</sup> Tradisi metode `irfānî yang dalam khazanah pemikiran keilmuan Islam lebih kental dengan tasawuf, bahkan tharikat, tentu saja tidak selaras dengan paham Muhammadiyah. Pengetahuan `irfānî dalam tradisi Muhammadiyah diterjemahkan dengan *ittibā`* rasul dengan beribadah sesuai dengan tuntunan yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW yang termuat dalam hadis Nabi.<sup>111</sup>

Secara praktis, ketiga pendekatan yang telah disesuaikan dengan manhaj Muhammadiyah ini, diterapkan dalam ijtihad keagamaan yang dilakukan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid. Ketiga pendekatan tersebut

<sup>107</sup>Simuh, *Tasawuf dan Perkembangannya dalam Islam*, Cet. I (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 49-73.

<sup>108</sup>Sayyed Hossein Nasr, *Pengetahuan dan Kesucian*, alih bahasa Sudarsono, Cet. I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 357.

<sup>109</sup>*Ibid.*

<sup>110</sup>Buku Agenda Munas Tarjih ke-27, Universitas Muhammadiyah Malan, 16-19 Rabiul Akhir 1431/ 1-4 April 2010, hlm. 110-117.

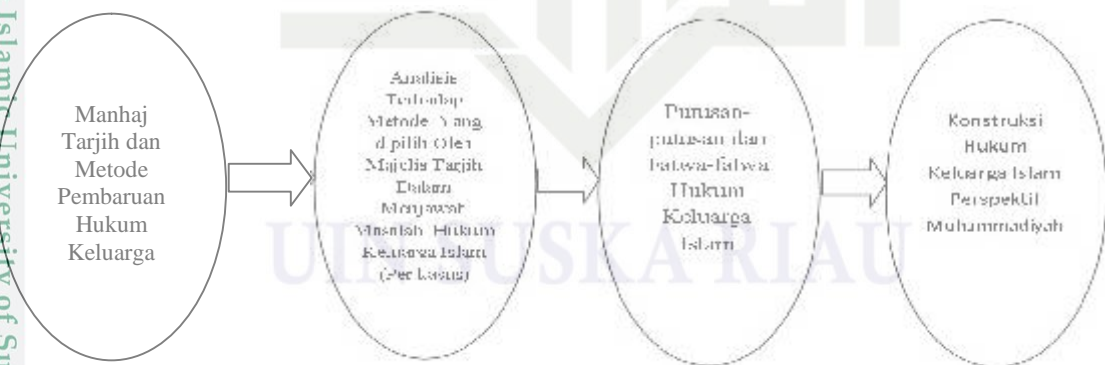
<sup>111</sup>*Ibid.*, hlm. 117.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dipergunakan secara bersamaan: *bayānî* (tekstual-normatif). Pendekatan ini merupakan studi filosofis terhadap bangunan ilmu yang menempatkan teks-teks agama sebagai rujukan pertama. Dengan pendekatan ini, ushul fikih berikut teknik-teknik ijtihad merupakan unsur utama dalam menggali hukum. *Kedua*, *burhānî* (kontekstual -argumentatif). Pendekatan ini mengedepankan indera dan logika untuk memperoleh pemahaman. Secara teknis, ilmu-ilmu sosial sangat membantu untuk memperoleh kelengkapan pemahaman. *Ketiga*, *`irfānî* (spiritual-instuitif). Pendekatan ini mengedepankan kejernihan jiwa yang diperoleh dengan *mujāhadah masyrū`ah* sehingga menyimpulkan keilmuan tidak hanya bersandar logika, namun dengan rasa agama yang mendalam.<sup>112</sup>

Apabila digambarkan dengan gambar diagram dalam rangka memudahkan dalam memahami kerangka kerja penulisan disertasi ini, dapat ditampilkan gambar sebagai berikut:



## B. Tinjauan Kepustakaan

Penelitian terhadap fatwa-fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid (MTT) Muhammadiyah, telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Sejauh

<sup>112</sup> Syamsul Hidayat, *Tafsir Dakwah Muhammadiyah: Respon Terhadap Pluralitas Budaya*, Cet. I (Surakarta: Kafilah, 2012), hlm. 78-80.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelusuran studi terdahulu yang relevan, ada ditemukan sumber-sumber referensi yang telah lebih dahulu menyoroti dari berbagai sudut pandang kajian. Telaah pustaka pada Bab ini, ada dua (2) jenis data kepustakaan; primer dan sekunder. Pada bagian ini penyusun akan mencantumkan terlebih dahulu sumber-sumber primer yakni buku-buku yang diterbitkan secara resmi oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Sumber- sumber ini nantinya pada penelitian ini menjadi referensi utama dalam penulisan.

Pertama, Adabul Mar`ah Fil Islam, sebuah kitab tuntunan yang dikeluarkan oleh Majelis Tarjih dan Tajid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Kitab ini adalah produk putusan Mukhtar Tarjih di Garut pada tahun 1976. Kitab ini adalah referensi primer bagi siapa saja yang ingin mengkaji fiqh perempuan baik dalam ranah tangga (domestik) atau ranah publik. Melalui kitab tuntunan inilah, Muhammadiyah sebagai organisasi Islam dianggap cukup progresif dalam menjawab tuntutan zaman, yang pada saat itu ada ketegangan teologis dan sosiologis di masyarakat Islam. dikatakan demikian karena, paham *mains-tream* saat itu menyatakan bahwa perempuan haram jadi pemimpin atau hakim. Sementara pada sisi sosiologis, banyak sarjana Hukum Islam dari kaum perempuan seiring berkembangnya Fakultas Syari`ah di IAIN yang didirikan oleh Kementerian Agama. Dalam situasi yang demikian, Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah membolehkan perempuan untuk menduduki posisi-posisi strategis di masyarakat, di antaranya hakim di Pengadilan Agama, tentu saja dengan tidak mengabaikan tugas dan tanggung jawab dalam keluarga.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kedua, Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah (HPT), sebuah kitab kompilasi Putusan Tarjih Muhammadiyah yang memuat berbagai putusan Hukum Islam termasuk di dalamnya terkait dengan fikih perempuan. Kitab HPT ini juga referensi primer bagi para peneliti yang ingin memahami secara langsung sumber otoritatif terkait putusan Hukum Islam Muhammadiyah.

Ketiga, Fatwa-Fatwa Tarjih Muhammadiyah dari jilid I-VIII . Dalam kitab ini memuat fatwa-fatwa Tarjih termasuk di dalamnya terkait dengan Hukum Keluarga Islam. Dengan meneliti buku-buku ini akan diperoleh konstruksi tuntunan Hukum Keluarga Islam menurut pandangan Muhammadiyah dari fatwa-fatwa yang berserak, karena memang fatwa ini berdasarkan atas pertanyaan-pertanyaan yang dilayangkan kepada Tim Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Dalam penelitian, kitab tuntunan ini tergolong referensi primer. Dan masih banyak buku-buku yang merupakan berita resmi organisasi yang memuat berbagai putusan tarjih Muhammadiyah di bidang keagamaan.

Berkaitan dengan referensi sekunder, dalam hal ini penelitian yang dilakukan oleh para sarjana Muslim terkait dengan pemikiran Muhammadiyah di berbagai bidang tentu saja sangat banyak, mengingat keberadaan Muhammadiyah yang sudah diakui oleh masyarakat Indonesia bahkan dunia internasional.

Penelitian-penelitian terhadap fatwa-fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah yang berkaitan dengan Hukum Keluarga Islam, ada beberapa yang sudah penyusun temukan yakni :

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pertama, ‘Pandangan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Tentang Nikah Sirri dan Itsbat Nikah: Analisis *Maqāshid Asy-Syarî`ah*’, ditulis oleh Wawan Gunawan dalam Jurnal Hukum Islam ‘MUSAWA, Vol. 12, Nomor 2, Juli 2013. Tulisan ini menyimpulkan bahwa fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid tentang kewajiban pencatatan nikah di KUA berlandaskan asas pokok Hukum Islam yang dikenal dengan *maqāshid asy-syarî`ah*.

Kedua, Fatwa Nikah Sirri Menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah Ditinjau dari *Maqāshid Asy-Syarî`ah*, skripsi Muhammad Iqbal Khalis di Universitas Muhammadiyah Malang. Penelitian ini meninjau fatwa Majelis Tarjih tentang nikah sirri dari sisi *maqāshid asy-syarî`ah* dan secara rinci dalam pembahasan dilengkapi dari sisi metode ijtihad dalam Hukum Islam di antaranya adalah *sad adz-zarî`ah* dan mashlahah.

Ketiga, penelitian lapangan terkait Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang program keluarga berencana (KB). Penelitian ini adalah hasil riset tesis di Universitas Airlangga, yang pada kesimpulan akhir penelitian bahwa Keputusan Majelis Tarjih tentang Keluarga Berencana merupakan hasil dari akumulasi pertanyaan-pertanyaan masyarakat dalam kurun waktu yang cukup lama.

Melihat dari penelusuran studi penelitian terdahulu sebagaimana disebutkan pada paragraf di atas menunjukkan bahwa studi terhadap fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid yang erat kaitannya dengan Hukum Keluarga Islam masih terbatas, yakni hanya berkaitan nikah *sirri* atau nikah di bawah tangan dan keluarga berencana (KB). Penelitian yang penyusun lakukan terkait dengan judul yang sedang diajukan ini mencakup semua fatwa Majelis Tarjih

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang berkaitan dengan Hukum Keluarga Islam yang sudah dibatasi sebagaimana pada penjelasan pembatasan masalah pada bab sebelumnya.

Dalam pemetaan awal, secara garis besar, kumpulan fatwa dan putusan yang sudah penyusun coba telaah meliputi dua (2) hal; pertama, masalah perkawinan dan perceraian berikut konsekuensi- konsekuensi turunannya. Dalam masalah ini muncul persoalan seperti pemeliharaan anak, nafkah, dan lain-lainnya. kedua, masalah kewarisan yang termasuk di dalamnya peminangan, syarat syah dan rukun nikah dan masih banyak masalah yang berkaitan dengan fatwa-fatwa ini. Dengan demikian, penelitian ini yang sedang diajukan belum pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti lain, sehingga terbebas dari duplikasi penulisan. Kalau pun ada penelitian terkait fatwa Majelis Tarjih yang berkaitan dengan Hukum Keluarga Islam, masih bersifat parsial. Sesuai dengan hasil penelusuran sebagaimana dipaparkan di atas, hanya masalah nikah *sirri* atau nikah di bawah tangan, dan keluarga berencana, dan untuk yang kedua ini lebih kepada penelitian lapangan.

Secara lebih jelas, letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah: pertama, penelitian ini lebih utuh karena mendalami lebih banyak kasus hukum keluarga, sehingga kesimpulan yang diperoleh lebih menyeluruh. Kedua, memahami metodologi ijtihad secara per kasus hukum keluarga dan hasil analisis dipadukan sehingga menjadi kesatuan utuh. Ketiga, penelitian ini menggunakan analisa perbandingan dengan lembaga fatwa yang lain, sehingga akan diketahui di mana letak perbedaan produk fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dalam hukum keluarga dengan lembaga yang lain.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

Metode yang yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Dalam penelitian hukum, termasuk di dalamnya Hukum Islam, pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh dari penelitian di masyarakat secara langsung, dan dari bahan-bahan kepustakaan. Data yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer, sedangkan data-data yang diperoleh dari kepustakaan disebut data sekunder. Data sekunder, dalam penelitian hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.<sup>113</sup>

Data-data penelitian ini adalah kumpulan fatwa-fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid (MTT) Muhammadiyah yang terkait dengan Hukum Keluarga Islam, dan sumber-sumber informasi lain yang ada kaitannya dengan judul yang diangkat pada penelitian ini. Data-data dalam kategori ini di antaranya karya-karya atau tulisan-tulisan tentang Hukum Islam yang ditulis oleh para tokoh yang memiliki otoritas pada lembaga Majelis Tarjih dan Tajdid (MTT) Muhammadiyah dan informasi-informasi yang diperoleh dari tokoh-tokoh yang berkecimpung di Majelis Tarjih dan Tajdid.

Data-data lain yang diperlukan dalam penelitian ini adalah seluruh referensi yang ditulis oleh para pakar di bidang Hukum Islam khususnya terkait

<sup>113</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Rajawali Press, 2012), Cet. Ke-14, hlm 12-14.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hukum Keluarga Islam yang bersifat komentar atau analisis terhadap fatwa-fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid (MTT) Muhammadiyah. Data-data pendukung dalam penelitian ini adalah bahan-bahan kepustakaan seperti buku-buku ushul fikih, ensiklopedi Hukum Islam, website resmi Muhammadiyah dan lain-lainnya.

Penelitian ini juga menggunakan metode penelitian komparatif atau perbandingan terhadap produk fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid (MTT) Muhammadiyah maupun metodologi yang dipergunakan dengan lembaga fatwa keagamaan yang lain, seperti Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Lembaga Bahsul masai Nahdhatul Ulama, maupun pandangan fikih secara umum dari para ahli sebagai penajaman pembahasan. Hal ini ditempuh karena dalam penelitian hukum normatif, perbandingan hukum merupakan sebuah metode yang cukup relevan.<sup>114</sup> Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dalam hukum keluarga disandingkan dengan metode pembaruan dalam hukum keluarga baik metode konvensional maupun metode pembaruan kontemporer seperti *takhshîs al-qadhâ*, *takhayyur*, *talfiq*, *siyâsah syar'iyah*, *re-interpretasi*, dan metode keputusan pengadilan. Dengan demikian dapat diketahui metode pengambilan hukum dalam hukum keluarga yang dilakukan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah.

### A. Teknik Pengumpulan Data

Faktor terpenting dalam penulisan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Bahan-bahan dalam penelitian ini adalah bersumber pada studi kepustakaan sebagai sarana untuk memperoleh hasil penelitian yang maksimal. Penelitian ini memerlukan sumber data kepustakaan baik berupa data-data primer, sekunder, maupun tersier.

<sup>114</sup> *Ibid.*, hlm 86

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengumpulan data-data kepustakaan dalam penelitian ini adalah dengan meneliti kumpulan fatwa-fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah di sejumlah perpustakaan Islam maupun di referensi-referensi on line.

## B. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah konten analisis dengan menggunakan ilmu ushul fikih. Langkah ini penyusun tempuh karena bidang kajian yang diteliti adalah Hukum Islam. Pendekatan dalil-dalil Hukum Islam seperti Al-Qur'an, hadis, *ijmā'*, *qiyās*, *istihsān*, *istishāb*, *syar'u man qablana*, *'urf*, *sad adz-dzari'ah*, dan fatwa sahabat adalah sebuah keharusan yang tidak boleh ditinggalkan. Manhaj yang ditempuh oleh mazhab-mazhab dalam Hukum Islam juga digunakan dalam menganalisa data-data ini sehingga akan diketahui di manakah posisi manhaj Tarjih Muhammadiyah. Secara lebih mendalam, penelitian fatwa-fatwa Hukum keluarga Islam produk Majelis Tarjih Muhammadiyah tentu saja menggunakan pisau analisis manhaj tarjih Muhammadiyah yang sudah dirumuskan oleh lembaga fatwa ini. Dengan upaya ini diharapkan akan memperoleh hasil kajian yang akurat.

## C. Sistematika Penulisan.

Penulisan disertasi ini dibagi dalam beberapa bab pembahasan untuk memudahkan dalam memetakan dan menganalisis pola penyajian penelitian. Pada bagian ini perlu dipaparkan sistematika pembahasan sebagai bahan acuan dalam penulisan disertasi.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bab pertama memuat pendahuluan dan metode penelitian. Pada bab pendahuluan ini memuat beberapa pokok pikiran yang dijadikan dasar pemikiran dalam penulisan disertasi yang meliputi; latar belakang permasalahan, pembatasan dan perumusan masalah, dan tujuan dan signifikansi penelitian. Latar belakang masalah menjelaskan alasan mengapa ‘Konstruksi Hukum Islam di Indonesia: Studi Terhadap Fatwa-Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Tentang Hukum Keluarga (1980-2017)’ dipilih sebagai judul disertasi ini.

Pembatasan masalah menjelaskan batasan-batasan penelitian yang mencakup dua (2) aspek: pertama aspek bidang hukum keluarga yang diteliti, dan kedua aspek rentang waktu yang akan diteliti, hal ini perlu mengingat Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah sudah cukup lama terbentuk sejak tahun 1927. Rumusan masalah menjelaskan pokok-pokok masalah yang ingin ditemukan dalam penelitian ini. Penjelasan ini penting dan menjadi inti dari penelitian. Tujuan dan signifikansi penelitian menjelaskan kegunaan hasil penelitian baik secara akademis maupun terapan. Dalam bab ini juga memuat tentang metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian disertasi yang memuat tentang teknik pengumpulan data dan analisa data yakni fatwa-fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah tentang Hukum Keluarga.

Pada bagian akhir bab ini memuat sistematika penulisan penelitian disertasi ini berikut penjelasan argumen ilmiah penempatan semua topik bahasan disertasi sesuai dengan urutan bab demi bab. Pada bab ini dipaparkan teknik pengumpulan data dan analisis data, dan sistematika pembahasan. Pada bagian ini dipaparkan metode yang digunakan dalam meneliti disertasi ini,



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yakni penelitian hukum normatif, sedangkan analisisnya menempuh jalan komparatif dalam sudut pandang ilmu ushul fikih. Pada bab ini juga dijelaskan teknik pengumpulan fatwa-fatwa tarjih Muhammadiyah yang selanjutnya diklasifikasi sesuai dengan tema, dan pada tataran akhir dianalisis secara historis dan konten analisis.

Bab kedua, landasan teoritis, kerangka konseptual, dan studi terdahulu yang relevan atau tinjauan kepustakaan. Pada bab ini dijelaskan secara mendetail tentang landasan teoritis yang dipergunakan dalam penulisan ini. teori konstruksi sosial dan metode pembaruan hukum keluarga baik yang konvensional yakni metode ijtihad yang selama ini dipergunakan oleh para ulama dalam menentukan hukum suatu masalah seperti *ijmāʿ*, *qiyās*, *istihsān*, *istishāb*, *ʿurf*, *sad al-dzarīʿah*, *syarʿu man qablana*, *fatwa sahabat*, dan penjelasan lafz dan makna, maupun metode kontemporer yang meliputi metode *takhshīs al-qadhā*, *takhayyur* atau *talfiq*, *siyāsah syarʿiyyah*, *re-interpretasi*, dan putusan pengadilan

Fatwa-fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah tentang hukum keluarga masuk dalam kerangka hukum keluarga yang berlaku di Indonesia sejak masuknya agama Islam di negeri ini. oleh karena itu teori konstruksi sosial dalam ilmu sosiologi sangat tepat dijadikan landasan teoritis dalam penulisan ini. teori konstruksi menekankan adanya kereturan yang berlaku secara masif di masyarakat sehingga menjadi sebuah praktik di masyarakat yang didukung oleh nilai-nilai keyakinan. Hukum keluarga adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai keimanan tersebut.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada bagian ini juga istilah-istilah yang selalu dipergunakan dalam penulisan ini, sehingga memudahkan untuk memilah konsekuensi dari istilah-istilah yang sering dipergunakan, di antaranya adalah istilah tentang hukum, hukum Islam, hukum keluarga, tarjih, tajdid, fatwa, putusan, wacana, dan ijtihad. Dengan penjelasan secara memadai diharapkan tidak ada lagi terjadi kerancuan dalam memahami produk-produk pemikiran Islam terkait dengan hukum keluarga.

Pada bab ini membahas secara memadai tentang dalil-dalil Hukum Islam yang disepakati (*muttafaq `alaih*) dan yang tidak disepakati oleh para ahli Hukum Islam. penjelasan tentang sumber Hukum Islam yang utama yakni al-Qur`an dan hadis yang kemudian *ijma`* dan *qiyās* dipaparkan di awal pembahasan yang kemudian dijelaskan teori-teori atau rumusan metodologi lainnya. Teori-teori ushul fikih yang telah dirumuskan oleh para ulama ushul, berikut kaidah-kaidah ushuliyah dan fiqhiyah disajikan secara memadai. Pemaparan tentang teori-teori ushul fikih dalam penelitian ini sangat penting karena medan pembahasan masuk pada ranah Hukum Islam. Produk Hukum Islam tidak akan pernah dipisahkan dengan ilmu ushul fikih. Secara lebih rinci, bab ini akan dipaparkan tentang pengertian hukum, hukum Islam, hukum keluarga, fatwa, ijtihad, tarjih, tajdid dan istilah-istilah yang terkait dengan penelitian ini.

Kerangka dasar pemikiran Muhammadiyah mendapat porsi yang cukup memadai dalam pembahaasan bagian ini, karena Muhammadiyah sebagai organisasi Islam yang sejak awal berdirinya memiliki visi untuk kembali kepada Al-Qur`an dan sunnah. Prinsip umum ini tentu saja

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diterjemahkan secara spesifik dalam metodologi dalam menggali dan memutuskan fatwa keagamaan dalam hal ini oleh adalah Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah sebagai lembaga yang berkiprah dalam memutuskan fatwa-fatwa keagamaan. Majelis Tarjih dan Tajdid memiliki metodologi atau manhaj yang masyhur dengan istilah manhaj tarjih Muhammadiyah. Dalam bab ini secara panjang lebar dijelaskan tentang manhaj yang dipergunakan oleh majelis ini.

Tidak kalah pentingnya, pada bagian ini dipaparkan tentang kerangka dasar pemikiran Muhammadiyah tentang keluarga sakinah. Pemaparan ini merujuk pada sumber-sumber otoritatif di antaranya putusan-putusan tarjih Muhammadiyah yang sudah terkodifikasikan secara baik dan lengkap. Penjelasan sangat perlu karena akan memudahkan kerangka makro konsep Muhammadiyah dan dikaitkan dengan fatwa yang sedang dikaji.

Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah menggunakan beberapa pendekatan dalam memutuskan fatwa keagamaan, yang barangkali memiliki sedikit perbedaan dengan lembaga fatwa lainnya. Pendekatan *bayānî* yang mendasarkan pada teks-teks keagamaan, *burhānî* bertumpu pada ilmu pengetahuan, dan *ʿirfānî* yang menyangkut kecerdasan spiritual dan laku ibadah seorang yang aktif di majelis ini dipaparkan secara memadai. Aspek kedua yakni *burhānî* atau ilmu pengetahuan pendukung mendapat porsi yang memadai di dalam fatwa-fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid di bidang selain akidah dan ibadah.

Selanjutnya pada bagian ini dipaparkan tentang kerangka konseptual yang dijelaskan dengan diagram gambar proses penelitian yang berfungsi

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk memudahkan penyusun dan pihak-pihak yang berkepentingan untuk memudahkan dalam memahami alur kerja penelitian. Semua uraian pada penelitian ini secara mudah dapat dipahami sehingga memudahkan dalam melakukan kajian terhadap fatwa-fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah yang berkaitan dengan hukum keluarga sebagaimana telah dibatasi pada topik pembatasan masalah.

Studi relevan terdahulu dipaparkan pada bab ini. penelusuran berfungsi menghindari duplikasi dan plagiat karya ilmiah, pada bab pendahuluan ini ada sub bab khusus yang memaparkan penelitian studi terdahulu yang relevan. Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh para sarjana terdahulu terkait dengan penelitian terhadap produk Majelis Tarjih secara umum dan Hukum Keluarga Islam khususnya dipaparkan pada sub bab ini, sehingga diketahui sudut pandang masing-masing peneliti. Dengan langkah ini, penelitian ini memilih pokok masalah yang belum pernah diteliti oleh para peneliti sebelumnya, yakni fokus pada penelitian putusan-putusan dan fatwa-fatwa Majelis Tarjih tentang Hukum Keluarga Islam. teori-teori ushul fikih umumnya dan manhaj tarjih khususnya dijadikan untuk pisau analisis dengan kombinasi latar belakang sosial yang melingkupi produk pemikiran Majelis Tarjih tentang Hukum Keluarga Islam.

Bab ketiga membahas secara lebih mendalam tentang metode penelitian. Pada bab ini dipaparkan teknik pengumpulan, analisis data, dan sistematika pembahasan atau penulisan disertasi ini. pada bagian ini dipaparkan metode yang digunakan dalam menulis disertasi ini yakni penelitian hukum normatif, sedangkan analisisnya menempuh jalan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

komparatif dalam sudut pandang ilmu ushul fikih. Pada bagian ini juga dijelaskan teknik pengumpulan fatwa-fatwa tarjih Muhammadiyah tentang hukum keluarga yang selanjutnya diklasifikasi sesuai dengan tema yang pada tataran akhir dianalisis secara historis dan konten analisis.

Bab keempat membahas sekilas tentang sejarah Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah. Majelis ini sangat penting dibahas seperlunya dalam bagian ini karena akan dapat memahami dan mengaitkan sejarah atau dinamika serta pokok-pokok pikiran yang dikehendaki oleh Majelis Tarjih dan Tajdid. Perlu juga ditampilkan pada bab ini kualifikasi ulama-ulama Muhammadiyah sesuai dengan yang telah ditentukan oleh sidang-sidang tarjih. Memaparkan silabus dan kurikulum yang diajarkan di lembaga perkaderan tarjih sangat membantu dalam melengkapi kesempurnaan dalam penelitian ini. Dengan demikian, kiprah Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah sebagai bagian dari tiang utama pergerakan Muhammadiyah di Indonesia tentu saja tidak hanya di bidang sosial politik semata, melainkan juga memiliki pengaruh besar dalam pengembangan pemikiran Islam Indonesia sebagai watak asli Muhammadiyah sebagai gerakan Islam.

Pada bab keempat ini secara sepintas dipaparkan tentang karakteristik dan kualifikasi ulama-ulama Muhammadiyah berikut kaderisasi ulama di lingkungan Muhammadiyah. Pemaparan ini sangat penting dilakukan karena sebagai lembaga yang mengeluarkan fatwa-fatwa keagamaan, Majelis Tarjih dan Tajdid harus diisi oleh kader-kader yang memiliki kualifikasi ulama secara umumnya dan kualifikasi kader pada khususnya.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada bab keempat ini dianalisa satu per satu fatwa-fatwa atau putusan-putusan tarjih yang terkait dengan Hukum Keluarga Islam sebagaimana telah dibatasi pada pembatasan masalah sebelumnya. Setiap putusan atau fatwa akan dianalisa dari kaca mata ushul fikih, yakni dalil-dalil Hukum Islam sebagaimana telah dirumuskan para ahli dalam karya-karya ushul fikih. Manhaj tarjih sebagai metode ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah juga dijadikan pisau analisa terhadap fatwa-fatwa atau putusan-putusan yang terkait dengan Hukum keluarga Islam. Penjelasan tentang kondisi sosial dan adat istiadat Indonesia menarik dijadikan pelengkap dalam menganalisa produk tarjih. Hal ini perlu ditekankan karena produk tarjih adalah jawaban atas pertanyaan umat Islam yang tidak pernah sepi dari pengaruh keadaan di sekelilingnya. Di samping itu, Hukum Keluarga Islam adalah menyangkut ibadah muamalah yang tentu saja tidak akan pernah lepas dari pengaruh sosiologis masyarakat. Pada bab inilah nampak dengan jelas hasil penelitian. Analisa terhadap fatwa ini secara otomotif juga menggunakan manhaj tarjih Muhammadiyah dan didekati dengan pendekatan *bayānî* yang bertumpu pada nash, *burhānî* yang didukung dengan ilmu pengetahuan terkait, dan *`rfānî* yang menekankan aspek spiritualitas penggali hukum Islam agar mendapatkan bimbingan Allah SWT.

Hal terpenting lagi pada bagian ini adalah meletakkan pemikiran tarjih Muhammadiyah dalam kerangka umum pemikiran hukum keluarga pada umumnya. Di manakah letak atau posisi fatwa tarjih Muhammadiyah apabila disandingkan dengan kerangka hukum keluarga umumnya. Dalam konteks ini menganalisa fatwa tarjih tentang hukum keluarga dengan menyandingkan

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan metode pembaruan konvensional yakni metode yang selama ini umumnya digunakan oleh para ulam dan metode pembaruan hukum keluarga kontemporer yakni *takhshîs al-qadhâ*, *takhayyur* atau *talfiq*, *siyâsah syar`iyyah*, *re-interpretasi*, dan keputusan pengadilan. Dengan demikian terurai dan diperoleh jawaban pokok masalah yang ingin diketemukan.

Bab kelima adalah penutup. Dalam bab ini disimpulkan hasil penelitian tentang Hukum Keluarga Islam dalam pandangan Majelis Tarjih Muhammadiyah yang berupa butir-butir kesimpulan dari hasil penelitian. Pemuatan butir-butir hasil penelitian sangat penting agar mudah dipahami para pengkaji pemikiran Muhammadiyah di bidang Hukum Keluarga Islam. Selanjutnya, sebagai upaya untuk memanfaatkan hasil karya ilmiah dan untuk menyempurnakan pemikiran Muhammadiyah pada Era mendatang, perlu dipaparkan saran-saran kepada Majelis Tarjih Muhammadiyah yang erat kaitannya dengan hasil penelitian.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN

#### A. Kesimpulan.

Muhammadiyah sebagai organisasi Islam memiliki corak pemikiran keagamaan sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) yakni gerakan Islam amar ma'ruf nahi mungkar dan tajdid berdasarkan Al-Qur'an dan al-Sunnah. implementasi prinsip ini terejawantahkan dalam *manhaj tarjih* Muhammadiyah yang merupakan seperangkat penggalian hukum atau aspek ajaran Islam lainnya seperti akidah, ibadah, muamalah duniawiyah, dan akhlak.

Dalam kesimpulan ini tentu saja mengacu pada pokok masalah yang telah dirumuskan dalam Bab I yakni; bagaimanakah konstruksi hukum Islam menurut Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dalam aspek hukum keluarga Islam di Indonesia dan metodologi apa yang dipergunakan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dalam berijtihad terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan hukum keluarga. Penelitian dalam kasus hukum keluarga (terkecuali hukum waris) selama kurun waktu 1980-2017 sebagaimana pembatasan dalam penelitian ini. ditemukan 29 fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid. Dalam rangka menjawab pokok masalah tersebut di atas, maka dalam kesimpulan ini penulis simpulkan dua hal yakni:

1. Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dalam hukum keluarga Islam mengedepankan kemaslahatan sesuai dengan konteks kekinian. Dalam hal ini ketetapan fatwa di samping memperhatikan aspek ushul fikih (*manhaj*



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tarjih) sebagai acuan penggalian hukum Islam juga mempertimbangkan aturan-aturan administratif modern sebagai upaya mewujudkan kemaslahatan bagi suami,, anak, istri, kedua belah pihak keluarga dan masyarakat pada umumnya.

2. Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dalam berijtihad menerapkan metode konvensional dan metode pembaruan kontemporer secara bersamaan. Metode konvensional adalah metode ijtihad dengan pendekatan ushul fikih yakni merujuk pada Al-Qur`an, al-Sunnah, *ijma`*, *qiyās*, *mashlahah mursalah*, *istishāb*, *istihsān*, *syar`u man qablana*, `urf atau adat istiadat, *sad al-dzar`ah*, dan seperangkat metodologi yang diterapkan oleh para ulama selama dalam menggali hukum Islam. Sedangkan metode pembaruan hukum keluarga kontemporer adalah metode yang diterapkan oleh Negara-Negara Muslim modern melalui institusi kenegaraan dalam rangka menuju hukum positif. Dalam hal ini metode *siyāsah syar`iyyah*, *takhîs al-qadhā*, *takhayyur* atau *talfiq*, re-interpretasi, dan keputusan pengadilan.

Setiap kasus hukum keluarga yang ditanyakan kepada Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dianalisis dengan metode konvensional yakni seperangkat metodologi ushul fikih yang selama ini telah diterapkan oleh para ulama dalam menggali hukum Islam. Langkah selanjutnya melihat apakah sudah ada aturan kenegaraan baik undang-undang terkait atau Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan aturan yang lain mengatur maka Majelis Tarjih dan Tajdid merujuk pada aturan-aturan tersebut sebagai upaya mewujudkan kemaslahatan. Langkah ini sesuai dengan matan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepribadian dan sifat Muhammadiyah yang taat pada hukum yang telah ditetapkan oleh negara.

**B. Saran-saran.**

Penulis telah melakukan penelitian fatwa-fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah tentang hukum keluarga dari tahun 1980 hingga 2017. Penulis membatasi penelitian ini selama kurun waktu tersebut oleh karena referensi lebih mudah didapatkan dengan merujuk kumpulan fatwa-fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid yang secara organisasi merupakan amanah Muktamar Muhammadiyah di Surakarta pada tahun 1985. Muktamar mengamanahkan kepada Majelis Tarjih dan Tajdid melakukan pembukuan fatwa-fatwa keagamaan yang telah dimuat dalam Majalah Suara Muhammadiyah. Dalam saran-saran ini penulis menyampaikan beberapa hal untuk ditindak lanjuti oleh peneliti berikutnya:

1. Penelitian terhadap fatwa-fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah tentang hukum keluarga selama kurun waktu sejak berdirinya majelis ini yakni tahun 1927 hingga 1980. Kendala penelitian ini selama kurun waktu ini, menurut penulis adalah sulitnya referensi pada kurun ini. Namun demikian, yang pasti menurut analisa penulis semua pemikiran Muhammadiyah baik sosial kemasyarakatan hingga agama sejak KH. Ahmad Dahlan hingga dewasa ini selalu dimuat dalam Majalah Suara Muhammadiyah yang merupakan corong resmi organisasi. Oleh karena itu, satu-satunya jalan adalah melacak majalah Suara Muhammadiyah dari sejak dirintis oleh KH. Ahmad Dahlan hingga tahun 1980.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Penelitian fatwa-fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah tentang kewarisan, wasiat, dan hibah. Penulis tidak meneliti bidang ini karena lebih kepada pembatasan masalah semata. Dari segi referensi relatif lebih mudah didapatkan dengan merujuk kumpulan fatwa-fatwa tarjih. Kendala akan didapati ketika meneliti kewarisan, wasiat, dan hibah sebelum tahun 1980 sebagaimana penulis jelaskan pada poin pertama.
3. Penelitian tentang wacana-wacana hukum keluarga yang beredar di kalangan personal-personal Majelis Tarjih dan Tajdid. Perlu penulis jelaskan bahwa dalam Majelis Tarjid dan Tajdid ada tiga jenis produk pemikiran: pertama putusan. Putusan adalah hasil ijtihad *jama`i* melalui forum muktamar atau musyawarah nasional tarjih yang tahapan selanjutnya diundangkan secara resmi oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Kedua, fatwa. Fatwa merupakan produk pemikiran Tim Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah. Produk ini belum mengikat seperti halnya putusan, tetapi fatwa ini sudah bisa menjadi pegangan warga Muhammadiyah. Ketiga adalah wacana. Produk ini adalah pemikiran person-person Majelis Tarjih dan Tajdid secara pribadi. Wacana tentang hukum keluarga menarik untuk diteliti seperti misalnya pemikiran tentang penggunaan teknologi genetika yang dapat secara akurat menentukan siapa ayah kandung dan bukan. Atas dasar ini, seorang anak yang lahir di luar nikah bisa saja belakang hari dapat menemukan siapa ayah kandungnya dengan bantuan teknologi genetika ini. dan masih banyak diskursus-diskursus yang berkaitan dengan hukum keluarga kontemporer.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hakim, Eksistensi Qaul Al-Shahabi Sebagai Dalil Syar'i, *MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan*, Volume 5, No 2, 2018.
- Abdurrahman, Asymuni, *Memahami Makna Tekstual, Kontekstual, dan Liberal: Koreksi Pemahaman Atas Loncatan Pemikiran*, Cet. II, Yogyakarta: Suara Muhammdiyah, 2008
- Abdurrahman, Asymuni *Metoda Penetapan Hukum Islam*, Cet. I, Jakarta: Bulan Bintang, 1986
- Abdurrahman, Asymuni, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah: Metodologi dan Aplikasi*, Cet. IV, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007
- Abdurrahman, Asymuni, *Qaqaid Fiqhiyyah: Arti, Sejarah, dan Beberapa Qaidah Kulliyah*, Cet. II, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2003
- Abu Amr Yūsuf Bin `Abdillāh bin Muhammad bin Abd Al-Bar bin `Ashim Al-Damri Al-Qurthubi, Al-Tamhîd Limā Al-Muwattha` Min Al-Ma`ānî Wa Asānid, (Muassasah Al-Qurtubah, TT), Juz X
- Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy`ats Al-Sajastani, *Shahîh Abu Dāwud*, Beirut, Dār Al-Kutub Al-`Arabi, TT, Juz II
- Abu Hafsh `Umar Bin Ali Abi `Adil Al-Dimsyaqi, *Tafsîr Al-Lubāb Lî Ibni `ādil*, Beirut, Dār Al-Kutub Al-`ilmiyah, Juz I
- Ali Shadiqun, *Figh Ushul Fiqh: Sejarah, Metodologi, dan Implementasinya di Indonesia*, Cet. I, Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012
- Ali, A. Mukti, *Ijtihad dalam Pandangan Muhammad Abduh, Ahmad Dahlan, dan Muhammad Iqbal*, Cet. I, Jakarta: Bulan Bintang, 1990
- Al-Imām al-Qādhî Abu al-Walîd Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Muhammad ibn Rusydi al-Qurthubî al-Mālikî, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtashid*, (Semarang: Thaha Putra, TT), , Jilid.8, hlm. 344.
- Al-Imām Taqiy al-Dîn Abî Bakar ibn Muhammad al-Husaini al-Hushnî al-Dimsyaqî al-Syāfi`î, *Kifayah al-Akhyār fî Jalli Ghāyah al-Ikhtishār*, (Semarang: Thaha Putra, TT), hlm. 257, jilid. 2.
- Andiko, Toha, *Imu Qawa'id Fiqhiyyah: Panduan Praktis Dalam Merespons Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Cet. I, Yogyakarta: Teras, 2011





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Anggaran Dasar Muhammadiyah, pasal 4 ayat 1 dan 2.
- Anwar, Syamsul Anwar, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah*, Yogyakarta: Panitia Musyawarah Nasional Tarjih Muhammadiyah XXX
- Anwar, Syamsul, *Diskusi dan Korespondensi Kalender Hijriyah Global*, Cet. I, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2014
- Anwar, Syamsul, *Hari Raya dan Problematika Hisab Rukyat*, Cet. I Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2008
- Anwar, Syamsul, *Hisab Bulan Kamariah: Tinjauan Syar'i Tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal, dan Zulhijjan*, Cet. I, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2009
- Anwar, Syamsul, *Interkoneksi Studi Hadis dan Astronomi*, Cet. I, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2011
- Anwar, Syamsul, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, Cet. I, Jakarta: RM Book, 2007
- Ashadi L. Diah, *Dinamika Pemikiran Hukum Islam di Indonesia dan Tantangannya*, Jurnal Al-Adl. Vol. 8, No. 2, Juli 2015, hlm. 39
- Azami, Muhammad Mustafa, *Hadis Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya*, Terjemah Ali Mustafa Yaqub, Cet. II, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000
- Budiyanto, Gunawan (ed), *Konstruksi Pemikiran Politik Ki Bagus Hadikusumo: Islam, Pancasila, dan Negara*, Cet. I, Yogyakarta: Program Doktor Politik Islam- Islam Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2018
- Chirzin, Muhammad, *Buku Pintar Asbabun Nuzul: mengerti Peristiwa dan Pesan Moral di Balik Ayat-Ayat Suci Al-Qur'an*, Cet. II, Jakarta: Zaman, 2012
- Dahlan, Abdur Rahman, *Ushul Fiqh*, Cet. I, Jakarta: Amzah, 2010
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 2002
- Dialog Jumat, <http://republika.co.id> akses 18 Februari 2020 jam 16.35 WIB.
- Dialog Jumat, <http://republika.co.id> akses pada Selasa, 18 Februari 2020 jam 16.00.
- Dialog Jumat, <http://republika.co.id> akses 18 februari 2020 jam 16.30 WIB.
- Dialog Jumat, <http://republika.co.id> dipost Jumat, 20 Maret 2015 diakses pada Selasa 18 Februari 2020 jam 15.36 WIB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Digilib.uinsby.ac.id akses 18 Februari 2020 jam 08.30 WIB.

Effendi, Satria M. Zein, *Problematisasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah*, Cet. III, Jakarta: Prenada Media Group, 2010)

Effendi, Satria M. Zen. *Ushul Fiqih*, Cet. IV, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 201

Eka Febrianti, *Perspektif Hukum Islam Tentang Pemeriksaan Kesehatan Pranikah: Studi di Kantor Urusan Agama dan Puskesmas Pekalongan Lampung Timur*, Skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017.

Faozan Amar dkk, editor, *Reaktualisasi dan Kontekstualisasi Islam Berkemajuan di Tengah Peradaban global*, Cet. I, Jakarta: Al-Wasat Publishing House, 2012

Farida, Umma, Diskursus Sunnah Sebagai Sumber Hukum Islam: Perspektif Ushuliyin dan Muhadditsin, *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*.

Fathoni, Khoirul, Metode Penyelesaian Ta'arudh Al-Adillah Dalam Metodologi Hukum islam, *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 2 (I), 2020, 45064.

Fathurrahman, *Ilmu Waris*, Cet. III, Bandung: Al-Ma'arif, 1994

Fatimah, Irma (ed), *Filsafat Islam, Kajian Ontologis, Epistemologis, Aksiologis, Historis, Prospektif*, Cet I, Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam LESFI, 1992

Firman Muhammad Arif, Pengembangan Metode Ijtihad Istishlahi Dalam Maqāshid al-syarī'ah, *Jurnal Al-Ahkam STAIN Palopo: jurnal ilmu Hukum dan Syari'ah*, September 2014.

Hadiy Jamil `Amir `Umar, *Ats-Tsabat wa At-Tathwir fi AT-Tasyri` al-Islami*, Cet I, (Palestina: Jami'ah An-Najah Al-Wathaniyyah, 2002

Hakim, Lukman (ed), *Dari Muhammadiyah Untuk Indonesia: Pemikiran dan Kiprah Ki bagus Hadi Kusumo, Mr. Kasman Singodimejo, dan K.H. Abdul kahar Mudzakir*, Cet. I, Yogyakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2013

Hanafi, A., *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Cet. ke-6, Jakarta: Bulan Bintang, 1991



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hasanul Rizqa, *KH Mas Mansur, Tokoh Muhammadiyah Yang Pejuang bangsa* (4), dikutip dari <http://m.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-digest/pn59nw458/kh-mas-mansur-tokoh-muhammadiyah-yang-pejuang-bangsa-4> pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 jam 10.15 WIB.

Hidayat, Syamsul, *Tafsir Dakwah Muhammadiyah: Respon Terhadap Pluralitas Budaya*, Cet. I, Surakarta: Kafilah, 2012

Hidayat, Syamsul, dkk, *Studi Kemuhammadiyahan: Kajian Historis, Ideologis, dan Organisatoris*, Cet. I, Surakarta: Lembaga Pengembangan Ilmu-Ilmu Dasar UMS, 2009

Hifdhotul Munawwarah, Sadd al-Dzarî'ah dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqih Kontemporer, *Jurnal Ijtihad Vol.12. No. I, Juni 2018*.

<http://m.republika.co.id/berita/ensiklopedia-islam/fatwa/10/05/08/114856-apa-hukum-bayi-tabung-menurut-islam-> akses 25 februari 2020 pada jam 07.30 WIB.

<http://tarjih.or.id/manhaj-tarjih-muhammadiyah>. Akses 19 Maret 2020 jam 11.15 wib.

<http://www.republika.co.id> akses 24 Maret 2020 jam 14.24 WIB.

<http://fis.unj.ac.id/labs/sosiologi/teori-utama-sosiologi/> akses 6 Oktober 2020 jam 07.00 wib.

<http://www.umm.ac.id/id/muhammadiyah/13248.html> akses 24 Oktober 2020 pukul 10.00.

<https://stikesmadani.ac.id/2015/12/12/bayi-tabung/> akses 25 Februari 2020 jam 08.39.

<https://republika.co.id/berita/oaxd0z313/apakah-sebenarnya-fatwa-itu>, akses 5 Juni 2020 jam 07.30.

<https://islam.nu.or.id> akses Kamis, 2 April 2020 jam 06.40 WIB.

<https://islama.nu.or.id>. Akses Senin 13 April 2020 jam 14.23 WIB.

<https://stikesmadani.ac.id/2015/12/12/bayi-tabung/> akses 25 Februari 2020 jam 07.40 wib.

<https://tarjih.or.id> akses 28 Maret 2020 jam 07.13 wib.

<https://kiwi.web.id/epistemologi.html>. akses 3 Januari 2021 jam 22. 58 wib.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hukum Adat Dalam Tinjauan Fiqih, <http://islam.nu.or.id> akses Selasa, 17 Maret 2020 jam 08.31 wib.

Humaidullah, Memed, *Status Hukum Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya*, Cet. I, Jakarta: Gema Insani Press, 2002

btimes.id wardan-diponingrat-san akses 8 Jnauari 2021 pada pukul 15.15 wib.

btimes.id wardan-diponingrat-san akses 8 Januari 2021 pada pukul 15.00 wib.

Id.m.wikimedia.org wiki RH akses 8 Januari 2021 pukul 1436.

Ihab Habudin, Menimbang Metode Tematik-Holistik dalam Pembaruan Hukum Keluarga Muslim (telaah Pemikiran Khoiruddin Nasution), *Al-Ahwāl Vol. 8, No. 1, 2015 M/ 1436 H*

Imam Yazid, Analisis Teori Syar`u Man Qablana, *Al Mashlahah Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*

Imron Rosyadi, *Pemikiran Asy-Syātibî Tentang Mashlahah Mursalah*, Profetika, Jurnal Studi Islam, Vol 14. No. I. Juni 2013, 79-89.

Ishaq Tri Nugroho, *Perkawinan Wanita Hamil dalam Pasal 53 KHI (Tinjauan Maqāshid Asy-Syarî`ah)*, Skripsi Fakultas Syari`ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

Ismail, *Khitbah Menurut Perspektif Hukum Islam*, Al-Hurriyyah, Vol. 10. No. 2 Juli-Desember 2009., hlm. 64.

Jabry, al, Abdul Mutal Muhammad, *Jarîmah al-Zawāj bighairi al-Muslimât: Fiqhuhā wa Siyāsah*, alih bahasa Ahmad Syathori, Cet.III, Jakarta: Bulan Bintang, 1996.

Jaih Mubarak, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, Cet. I, Yogyakarta: UII Press, Mubarak, 2002

Jalil, A. Basiq, *Peradilan Islam*, Cet. I (Jakarta: Amzah, 2012

Jamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997, Cet. Ke-1

Jazuli, H. A., *Kaidah-Kaidah Fikih: kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, Cet. IV, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006

Jurdi, Syariffudin, dkk, *I Abad Muhammadiyah: gagasan Pembaruan Sosial Keagamaan*, Cet. I, Jakarta: Kompas, 2010



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © K.H.Q Shaleh dan H.A.A Dahlan et al, *Asbabun Nuzul: Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat Al-Qur'an*, Cet. X, (Bandung: Diponegoro, 2011
- Ka`bah, Rifyal, *Hukum Islam di Indonesia: Perspektif Muhammadiyah dan NU*, Cet. I, Jakarta: Universitas Yarsi, 1998
- Kansil, C.S.T I, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet. ke-6, Jakarta: Balai Pustaka, 1984
- Karim, A. Syafi'i, *Fiqh Ushul Fiqih*, Cet. II, Bandung: Pustaka Setia, 2001
- Karto Aji, Muhammad Miftah, *Hukum Mahar Dalam Tajdidun Nikah: Studi Komparatif Pendapat Imam Ibnu Hajar al-Haitami dan Imam Yusuf al-Ardabili*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, tahun 2017
- Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi Yang Dosempurnakan, , jilid 1, Cet. I* (Jakarta: Kementrian Agama Republik Indonesia, 2012
- KH. Mas Mansur, *Tafsir langkah Muhammadiyah*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Khairani dan Cut Nanda Mayasari, *Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam : Studi Kasus di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang*, Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Volume1 No 2. Juli Desember 2017. <http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah>. Akses 24 Februari 2020 Jam. 07.00.
- Khairil Ikhsan Siregar, *Nikah Mut'ah dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadis*, Jurnal Studi Al-Qur'an: Membangun Tradisi Beroikir Qur'ani, Vol. 8, No. I Tahun 2012,
- Khalaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, Cet. XII, Kairo: Dār al-Qalam, TTP
- Khudhary, Asy-Syaikh Muhammad Bik, *Ushul al-Fiqh*, Cet. ke-6, Mesir: At-Tijāriyah Al-Kubrā, 1969
- Kompilasi Hukum Islam di Indonesia
- Konsep Pembaruan Muhammadiyah (1), <http://republika.co.id/berita/m8p4as/konsep-pembaruan-muhammadiyah-1>, akses 5 Juni 2020 jam 07.00 wib.
- Lubis, Dedek Jannatu Rahmi, *Hukum Tukar Cincin Pada Saat Lamaran (khitbah) di Kelurahan Selawan Kecamatan Kisaran Timur: Analisis Pandangan Mazhab Syafi'i*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara, 2018.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Lukito, Ratno, *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesi*. (Jakarta: INIS, 1998

Luthfi, Musthafa dan Mulyadi Luthfi, *Nikah Sirri: Membahas Tuntas Definisi, Asal-Usul, Hukum, Serta Pendapat Ulama Salaf dan Khalaf*, Cet. I, Surakarta: Wacana Ilmu Press, 2010

M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama: Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Total Media Yogyakarta, TT

M. Noor Harisudin, `Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara, *Al-Fikr Volume 20 Nomor 1 Tahun 2016*.

m.republika.co.id akses 8 Januari 2021 pada pukul 1625 wib.

Mahfud, Moh. MD, et al (Ed), *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Cet. I, Yogyakarta: UII Press, 1993

Mahfudz, Moh. MD dkk (ed), *Peradilan Agama Dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Dalam Tata Hukum Indonesia*, Cet. I, Yogyakarta: UII Press, 1993

Mahsun Fuad, Zawāj al-Misyār: Perspektif Maqāshid Syarī`ah Pernikahan, dalam *Al-Mabsut Jurnal Studi Islam dan Sosial Vol 11, No. 1 Maret 2017* Institut Agama Islam Ngawi.

Mahsun, Zawāj al-Misyār: *Perspektif Maqāshid asy-Syarī`ah Pernikahan, Al-Mabsūt: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, Institut Agama Islam Ngawi, Volume 11. No. 1 Maret 2017

Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Buku Materi Musyawarah Nasional Tarjih ke-30 di Universitas Muhammadiyah Makasar*.

\_\_\_\_\_, *Adabul Mar`ah fil islam*, Cet. I, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2010

\_\_\_\_\_, *Naskah Musyawarah Nasional Tarjih ke-27 Tarjih Muhammadiyah*, Universitas Muhammadiyah Malang, 2010

\_\_\_\_\_, *Perkaderan Ulama, Organisasi, dan Prioritas Program*, materi Munas Tarjih ke-29 di Yogyakarta. Hlm. 2-3.

\_\_\_\_\_, *Buku Materi Munas Tarjih Muhammadiyah XXXI*, Universitas Muhammadiyah Gresik, Jawa Timur.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
- \_\_\_\_\_, *Adabul Mar`ah Fil Islam* Cet, II, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2010
- \_\_\_\_\_, *Buku Agenda Munas Tarjih ke-27*, Universitas Muhammadiyah Malang, 16-19 Rabiul Akhir 1431/ 1-4 April 2010
- \_\_\_\_\_, *Buku Agenda Musyawarah Nasional ke-27 Tarjih Muhammadiyah*, Universitas Muhammadiyah Malang 16-19 Rabiul Akhir / 1-4 April 2010
- \_\_\_\_\_, *Buku Materi Musyawarah Nasional Tarjih ke-28*, Palembang. 27 februari-1 Maret 2014.
- \_\_\_\_\_, *Buku Materi Munas Tarjih ke-30*, 2015 di LPMP DIY.
- \_\_\_\_\_, *Fatwa-fatwa Tarjih: Tanya jawab Agama*, Cet. I, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, (2017), Jilid 8
- \_\_\_\_\_, *Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah*, Cet. I, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 201
- \_\_\_\_\_, *Materi Musyawarah Nasional ke-27 Tarjih Muhammadiyah*, Universitas Muhammadiyah Malang pada 16-19 Rabiul; Akhir 1431 H/ 1-4 April 2010
- \_\_\_\_\_, *Materi Musyawarah Nasional Tarjih ke-27*, Universitas Muhammadiyah Malang 1-4 April 2010.
- \_\_\_\_\_, *Wacana Fiqh Perempuan Dalam Perspektif Muhammadiyah*, Cet. I, Jakarta: UHAMKA Press, 2005
- Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*, Cet. I Surabaya: Erlangga, 2011
- Mubarak, Jaih *Modifikasi Hukum Islam: Studi Tentang Qawl Qadim dan Qawl Jadid*, Cet. I, Jakarta: Rajawali Press, 2002
- Muhammad bin `abdillah Al-Khatib Al-Tabrizi, *Misykāt Al-Mashābih*, Beirut: Al-Maktabah Al-Islāmī, TT, Juz II, hadis ini berkualitas Gharib karena dalam sanadnya ada nama `Atha` bin `ajlān.
- Muhammad bin `îsā Abu `îsā Al-Tirmidzi Al-Salimi, *Sunan Al-Tirmidzi*, Beirut: Dār Al-Ihyā` Al-Turāts Al-`Arabi, TT), Juz III
- Muhammad bin Yazid Abu `Abdillah Al-Qazwaini, *Sunan Ibnu Mājah*, (Beirut: Dār Al-Fikr, TT), Juz I, Hlm. 611. Dalam sanadnya ada nama Khalid bin Ilyās Abu Al-Haitsami yang disepakati dha'if-nya. Akan tetapi Syaikh Al-Albāni hadis ini kualitasnya hasan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Muhammad bin Yazid Abu `Abdillah Al-Qazwaini, *Sunan Ibnu Mājah*, Beirut: Dār Al-Fikr, TT, Juz I
- © Muhammad Hasyim, Epistemologi Islam: Bayānî, Burhānî, dan `Irfānû), *Al-Murabbi: Jurnal Pendidikan Islam* Program studi Pendidikan Agama Islam Universitas Yudharta Pasuruan, Vol. 3 Nomor 2, Juni 2018.
- © Muhammad Iksan, *Pola Kepemimpinan Ahmad Dahlan Dalam Kehidupan Beragama*, <http://digilib.uinsby.ac.id/14826/> akses pada hari Selasa 29 Oktober 2019 pada jam 08.00 WIB.
- © Muhammadiyah.or.id-news-195 akses 9 Oktober 2020 pukul 21.15 wib.
- © Mujahid, Abu, *Sejarah Muhammadiyah: Gerakan Tajdid di Indonesia*, Cet. I, Bandung: Tobagus Publishing, 2013
- © Mujib, Fatkhul, Perkembangan Fatwa di Indonesia, *Nizham* Vol. 4, Nomor 1, Januari-Juni 2015
- © Mujib, M. Abdul dkk, *Kamus Istilah Fiqih*, Cet. IV, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2010
- © Mujtahid, Gerakan Pemikiran Muhammadiyah: Antara Purifikasi dan Modernisasi, [www.muhammadiyah.or.id](http://www.muhammadiyah.or.id), akses 3 Juni 2020 jam 17.00. wib.
- © Muksin Nyak Umar dan Rini purnama, Persyaratan Pernikahan Menurut Mazhab Hanafi , <https://jurnal.ar-raniry.ac.id> akses Jumat, 03 April 2020 jam 20.20 WIB.
- © Muktar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Cet. III, Jakarta: Bulan Bintang, 1993
- © Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Cet. ke-14, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997
- © Muslehuddin, Muhammad, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis; Studi Perbandingan system Hukum Islam*, penerjemah, Yudian Wahyudi Asmin, Cet. I, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1991
- © Muslim, Abu Al-Husain Al-Qusairi Al-Naisaburi, *Shahîh Muslim*, Beirut: Dār Al-ihyā` Al-Turāts Al-`Arabî, TT), Juz II
- © Muslim, Abu Husain bin Hujjaj bin Al-Qusairi Al-Naisaburi, *Sahîh Muslim*, Beirut, Dār Al-ihyā` Al-Turāts Al-`Arabi, TT), Juz II





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muzhar, Atho dan Khairudin Nasution, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern: Studi Perbandingan dan Keberangkatan UU Modern dari Kitab-Kitab Fikih*, Cet. I, Jakarta: Ciputat Press, 2003

Naim, al, Abdullah Ahmed *Dekonstruksi Syari'ah*, alih bahasa Farid Wajdi, Cet I, Yogyakarta: LKiS, 1995

Nashir, Haedar, *Manhaj Gerakan Muhammadiyah: Ideologi, Khittah, dan langkah*, Cet. III, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2013

Nashr, Sayyed Hossein, *Pengetahuan dan Kesucian*, alih bahasa Sudarsono, Cet. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997

Nasri, Imron, *Muhammadiyah Berjuang Demi Tegaknya NKRI dan Agama Islam*, Cet. I, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2012

Nasution, Khoiruddin *Hukum Perkawinan I: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, Cet. I, Yogyakarta: Akademika, 2013

\_\_\_\_\_, *Metode Pembaruan Hukum Keluarga Islam Kontemporer, UNISIA. Vol. XXX. No. 66 Desember 2007.*

\_\_\_\_\_, *Hukum Perkawinan dan Kewarisan di Dunia Muslim Modern*, Cet. I, Yogyakarta: Akademika, 2012

\_\_\_\_\_, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim: Studi Sejarah, Metode, Pembaruan, dan Materi dan Status Perempuan Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Muslim*, Cet. I, Yogyakarta: Akademika dan Tazaffa, 2009

\_\_\_\_\_, *Metode Pembaruan Hukum Keluarga Islam Kontemporer, UNISIA, Vol. XXX No. 66 Desember 2007.*

\_\_\_\_\_, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, Cet. I, Yogyakarta: Academia + Tazaffa, 2010

Nurruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. I/1974 sampai KHI*, Cet. ke-5, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2014)

Nurruddin, Amiur, *Ijtihad Umar Ibn Al-Khaththab; Studi tentang tentang Perubahan Hukum Dalam Islam*, Cet. 1, Jakarta: Rajawali Press, 1991

Pasha, Musthofa Kamal dan Ahmad Adaby Darban, *Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam Dalam Perspektif Historis dan Ideologis*, Cet. III Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- Pengurus Besar Nahdhatul Ulama, *Ahkamul Fuqaha: Solusi Problematika Aktula Hukum Islam, Keputusan Muktama, Munas, dan Konbes Nahdhatul Ulama 1926-2010*, Cet. I, Surabaya: Khalirta, 2011
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah 3*, Cet. I, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2018
- \_\_\_\_\_, *Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2009
- PP No. 10 Tahun 1975.
- Qardhawi, Syekh Muhammad Yusuf, *Halal dan Haram dalam Islam*, alih bahasa Mu`ammal Hamidi, edisi revisi. Surabaya: Bina Ilmu, 2010
- Qutb, Sayyid, *Fî Dhilāl al-Qur`ān*, alih bahasa Aunur Rafiq Shaleh Tamhid, Cet. 2, Jakarta: Rabbani Press, 2003
- Rafik, Muhammad Mudzakir, *Problematika Fikih Perempuan*, Cet. I, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2014
- Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Cet. ke-36, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994
- Rista Laily Prestyana dan Gadhung Fajar Panjalu, *Pembatasan Keturunan (tahdid al-nasl): Studi Komparasi Fatwa MUI dan Putusan Majelis Tarjih Tarjih Muhammadiyah Perspektif Maqashid Syari`ah, Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam/Vol.6.No2.2017*, Universitas Muhammadiyah Surabaya.
- Rosyadi, Imron, *Tarjih Sebagai Metode: Prespektif Usul Fiqih, Ishraqi*, Volume 1 No. 1 Januari 2017.
- Ruhaini, Siti, Dzuhayatin, *Rezim Gender Muhammadiyah; Kontestasi Gender, Identitas, dan Eksistensi*, Cet. I, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Press dan Pustaka Pelajar, 2015
- Sa`di Abu Habib, *Mausu`atul ijmā`*, alih bahasa A. Sahal Mahfudz dan Mustofa Bisri, Cet. V, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011
- Sastroatmojo, Arso dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Cet. III, Jakarta: Bulan Bintang, 1981
- Shiddiqi, al, Hasbi, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, Cet. I Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997
- Shihab, M. Quraish, *Membumikan Al-Qur`an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Cet. I, Bandung: Mizan, 2007
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudh'î Pelbagai Persoalan Umat*, Cet. XVIII (Bandung: Mizan, 2007)

Simuh, *Tasawuf dan Perkembangannya dalam Islam*, Cet. I, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Sirajudin, Kontruksi Hukum Keluarga Islam di Indonesia: Analisis Terhadap Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Istinbath-Jurnal Hukum Islam*, Vol. 14, No. 2, Desember 2015, hlm. 159.

Siti Ninik Purnawati, *Istinbath Hukum Mazhab Hanafiyah Tentang Nikah Tanpa Wali dalam Kitab Bada'ii 'As-Shana'i`*, Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Walisongo, Semarang, 2015.

Sodiqun, Ali, *Fiqh Ushul Fiqih: Sejarah, Metodologi, dan Implementasinya di Indonesia*, Cet. I, Yogyakarta: Beranda, 2012

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. 14, Jakarta : Rajawali Press, 2012

Supriyadi, Dedi, *Perbandingan Mazhab Dengan Pendekatan Baru*, Cet. I, Bandung: Pustaka Setia, 2008

Suyono, Hukum Keluarga: Perspektif Antropologi Hukum Islam, dalam *Jurnal Ilmiah Asy-Syir'ah Vol. 16 No. 1 Tahun 2018*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado.

Suyuthi, al, Jallal al-Din Muhammad ibn Ahmad al-Mahallî wa Jallal al-Din `Abd al-Rahman Ibn Abi Bakr, *Tafsîr al-Qurân al-`Adhîm*, (Semarang\_Thaha Putera, TTP

Syafei, Rahmat, *ilmu Ushul Fiqih*, Cet. III, Bandung: Pustaka Setia, 2007

Syafei, Zakaria, Ijmâ` Sebagai Sumber Hukum Islam: Kajian Tetang Kehujjahan Ijmâ` dan Pengingkarannya, *Jurnal Al-Qalam No. 67/ XIII/ 1997*.

Syarafi, Al, Abdul Majid, *Al-Ijtihād al-Jamā'î Fî al-Tasyrî' al-Islāmî*. Terj. Abduh Zulfidar Akaha, Cet. I, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002

Syatibi, Al, Abú Ishāq Ibrhîm bin Músā Al-Husnî Al-Mālikî, *Al-Muwāfaqāt Fî Ushûl Al-Syarî'ah*, Cet. 3, Libanon: Dār Al-Kutub Al-`Arābiyyah, 2003 Jilid 4

Syukur, Syarmin, *Sumber-Sumber Hukum Islam*, Cet. I, Surabaya: Al-Ikhlâs, 1993

Tarantang, Jefry, Teori dan Aplikasi Pemikiran Kontemporer Dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Islam, *Jurnal Transformatif*, <http://e-journal-iain-palangkaraya.ac.id/index.php/TF> Vol.2, No. 1 April 2018.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tim Ahlul Bait Indonesia (ABI), *Buku Putih Mazhab Syi'ah: Menurut Para Ulama yang Mu'tabar*, Cet. IV, (Jakarta: Depan Pengurus Pusat Ahlul Bait Indonesia, 2012

\_\_\_\_\_, *Syi'ah Menurut Syi'ah*, Cet. II (Jakarta: Dewan Pengurus Pusat Ahlul Bait Indonesia, 2014), hlm. 166.

Tim Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Fatwa-Fatwa...*, Jilid. 8, hlm. 48-49.. tek ini penyusun menemukan dalam Muhammad bin `îsâ Abu `îsâ Al-Tirmidzi Al-Sâlimî, *Sunan Tiimidzi*, (Beirut: Dâr Al-Ihyâ` Al-Turâts, TT), Juz III, Hlm. 402. Menurut Abu Isa hadis ini berkualitas hasan, sedangkan menurut Syaikh Al-Albânî hadis ini berkualitas shahih.

Tim Konsultasi Syari'ah Bimas Islam, 'Bab Nikah Tentang Mahar' dikutip dari Website Bimas Islam (Direktorat jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama), <https://bimasislam.kemenag.co.id/konsultasisyariah/tanyajawab/detail/bab-nikah-tentang-mahar>, pada Sabtu 15 Februari 2020 jam 07.42 WIB.

Tim Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Fatwa-Faatwa...*, hlm. 144-145, jilid 2.

\_\_\_\_\_, Abu al-Husain Muslim bin Al-Hujjaj in Muslim Al-Qusairi Al-Naisaburi, *Al-Jamî` Al-Shahîh Muslim*, (Beirut, Dâr Al-Afâq Al-Jadîdah, TT), Juz IV, Hlm. 143

\_\_\_\_\_, *Fatwa-Fatwa Tarjih: Tanya Jawab Agama 1*, Cet. VII. (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2003) Jilid 1

\_\_\_\_\_, Abu Husain Al-Husaini Al-Naisaburi, Shahîh Muslim, (Beirut, Dâr Al-Ihyâ` Al-Turâts Al-`Arabi, TT), Juz II, Hlm. 1069.

Undang-Undang No. I Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Utsaimin, Muhammad bin Shalih, *Al-Ushul Min `Ilm Al-ushul*, Cet. I, Iskandariyah: Dar al-Kutub Al-~Arabi, 2001

UU No. I Tahun 1974 Tentang n Perkawinan.

UU RI No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Wet.if.unila. ac.id posted 11-05-2015 akses 22 Oktober 2020 pukul 17.02 wib

Wet.if.unila.ac.16 dipost 11-05-2015 akses 22 Oktober 2020 pukul 16.50 wib.

Wikimedia akses 8 januari 2021 pukul 17,00 wib.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Wira Hadi Kusuma, Epistemologi Bayānî, `Irfānî, dan Burhānî Al-Jabiri dan Relevansinya Bagi Studi Agama Untuk Resolusi Konflik dan Peacebuilding, Syi`ar Vol. 18 No.1 Januari –Juni 2018

[www.britanica.com](http://www.britanica.com) akses 13 Mei 2018.

[www.muslim.or.id](http://www.muslim.or.id) akses 13 Mei 2018

[www.suaramuhammadiyah.or.id](http://www.suaramuhammadiyah.or.id) akses 8 Januari 2021 pukul 13.50 wib.

Yanggo, Huzaemah Tahido, *Pengantar Perbandingan Mazahb*, Cet. IV Jakarta: Gaung Persada Press, 2011

Yuni Lestari, *Kepemimpinan K.H. Mas Mansur Di Dalam Organisasi Muhammadiyah Tahun 1921-1946*, dikutip dari <http://digilib.uin-suka.ac.id/32521/> pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 pada jam 10.00 WIB.

Zidamrajaayah.b;ogspot.com prof akses 8 Januari 2021 pada pukul 16.51 wib

Zuhdi, Masyjfuk, *Masail Fiqhiyyah : Kapita Selektta Hukum Islam*, Cet. V, Jakarta: Haji Masagung, 1993

Zulkarnaen, Iskandar, *Gerakan Ahmadiyah Di Indonesia*, Cet. II Yogyakarta: LKiS, 2006

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## CURRICULUM VITAE

Nama : Suyono

Tempat Tanggal Lahir : Klaten, 11 Demeber 1976

Jenis kelamin : laki-laki

Agama : Islam

Alamat : Masjid Al-Muthmainnah, RT 04 RW 03 Bengkong  
Abadi 1, Tanjug Buntung, Bengkong, Batam,  
Kepulauan Riau

Status : Menikah

Riwayat Pekerjaan :

1. Karyawan PT Mc. Dermott Indonesia 2006-2011
2. Dosen Agama Islam di Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Muhammadiyah Batam 2013-sekarang
3. Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kepulauan Riau periode 2011-2014, 2014-2017
4. Staf Ahli DPRD Provinsi Kepulauan Riau 2018-2019

Riwayat Pendidikan :

1. SD Negeri Karangpakel III, Klaten, Jawa Tengah tahun lulus 1989
2. MTs. Negeri Mlinjon Klaten, Jawa Tengah tahun lulus 1992
3. Madrasah Aliyah Muhammadiyah I Klaten Jawa Tengah tahun lulus 1995
4. Fakultas Syari`ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun lulus 2000
5. Magister Studi Islam/ Hukum Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta tahun lulus 2014

Riwayat organisasi :

1. Ketua Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Kepulauan Riau 2015-2019
2. Ketua Umum Persatuan Muballigh Kota Batam 2020-2025

Pekanbaru, Februari 2021

Suyono